

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENULISAN**

#### **4.1 Gambaran Umum kantor Perwakilan BKKBN Propinsi Bengkulu**

BKKBN dibentuk berdasarkan TAP MPR No. IV/1999 tentang GBHN. Tugas yang harus dijalani BKKBN Propinsi Bengkulu, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya tugas pokok, fungsi kantor BKKBN Propinsi Bengkulu ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dari BKKBN, fungsi tersebut adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.

Kantor perwakilan BKKBN Propinsi Bengkulu terletak di tengah Kota Bengkulu tepatnya di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang harapan, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Adapun visi dan misi Kantor BKKBN Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Visi : Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana
- Misi : Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

Dalam mempermudah pengkoordinasian terhadap masyarakat yang ada di daerah untuk pelaksanaan program-program BKKBN Pusat melalui BKKBN Propinsi Bengkulu, untuk itu terdapat kantor-kantor perwakilan di daerah yang tersebar di Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Bengkulu, yang terdiri dari :

1. Kabupaten Bengkulu Utara  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

2. Kabupaten Bengkulu Selatan  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Kabupaten Rejang Lebong  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
4. Kota Bengkulu  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
5. Kabupaten Muko-Muko  
Dengan nama Kantor : Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan, dan PP.
6. Kabupaten Kaur  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB.
7. Kabupaten Seluma  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan KB.
8. Kabupaten Kepahyang  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan KB.
9. Kabupaten Lebong  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB.
10. Kabupaten Bengkulu Tengah  
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, KB dan Pemerintah Desa.

#### **4.2 Gambaran Umum Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**

Kantor BPMPKB terletak ditengah Kota Bengkulu tepatnya di jalan museum Nomor 6 padang Harapan, kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. BPMPKB dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tugas pokok BPMPKB Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan, penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugas tersebut BPMPKB Kota Bengkulu mempunyai fungsi yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- d. Melakukan kegiatan kesekretariatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun visi dan misi dari BPMPKB Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Visi : Menuju masyarakat sejahtera melalui keluarga berencana dan kesetaraan gender.

Misi :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan institusi masyarakat
2. Mengembangkan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pengarusutamaan gender
4. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak.
5. Meningkatkan pelayanan KB

#### **4.2.1 Sejarah Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**

Kantor BPMPKB Kota Bengkulu pada awalnya yaitu kantor BKKBN Kota Bengkulu. Masyarakat banyak mengenal kantor BPMPKB ini sebagai anak dari kantor BKKBN. Pada dasarnya kedua kantor ini memiliki visi yang sama yaitu masalah pemberdayaan masyarakat akan tetapi BPMPKB lebih terpusat yaitu menekankan pada jumlah penduduk, kesejahteraan ibu dan anak.

Kantor BPMPKB terdiri dari beberapa bidang dan subbidang. Dengan jumlah pegawai dan Staf sebanyak 99 Orang.

Berikut ini digambarkan jumlah pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu.

**Tabel 4.1 :**  
**Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	S2	8	8,09
2	S1	55	55,55
3	D3	6	6,06
4	D1	2	2,02
5	SLTA Sederajat	26	26,26
6	SLTP Sederajat	2	2,02
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013)

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu yang tingkat pendidikannya sarjana sebanyak 63 Orang yang terdiri dari tingkat S1 sebanyak 55 Orang atau 55,55 %, dan S2 hanya 8 Orang atau 8,07%. Kemudian untuk tingkat pendidikan urutan kedua yaitu SLTA sederajat sebanyak 26 Orang atau 26,26%. Sedangkan untuk tingkat diploma sebanyak 8 Orang yang terdiri dari D3 yaitu 6 Orang atau 6,06% dan D1 2 Orang atau 2,02%. Dan untuk tingkat pendidikan terendah yaitu tingkat SLTP sebanyak 2 Orang saja atau 2,02% dari jumlah pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu.

Jadi, mayoritas tingkat pendidikan dari pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu adalah Sarjana atau strata 1.

Selain dari tingkat pendidikan, jika diurutkan berdasarkan tingkat Golongan maka datanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 :**  
**Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Golongan**

No	Tingkat Kepangkatan Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	IV /c	1	1,02
2	IV /b	2	2,02
3	IV/c	15	15,15
4	III/d	35	35,35
5	III/c	13	13,13
6	III/b	13	13,13
7	III/a	8	8,08
8	II/c	2	2,02
9	II/b	8	8,08
10	II/a	2	2,02
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013)

Jumlah pegawai terbanyak berdasarkan golongan kepangkatan ada pada golongan III/d yaitu sebanyak 35 orang atau 35,35%, kemudian disusul dengan golongan IV/c sebanyak 15 orang atau 15,15%. Untuk golongan III/c dan III/b jumlahnya sama yaitu sebanyak 13 orang atau 13,13%. Begitupun untuk golongan III/a dan II/b jumlah pegawainya sama banyak yaitu sebanyak 8 orang atau 8,08%, sedangkan untuk terakhir kedua, golongan IV/b, II/c dan II/a sebanyak 2 orang atau 2,02%. Dan yang terakhir sebanyak 1 orang atau 1,02%

untuk golongan IV/c dan yang termasuk dalam golongan ini adalah Kepala Dinas Kantor BPMPKB Kota Bengkulu.

Selain dari tingkat pendidikan dan Golongan kepangkatan, jika diurutkan berdasarkan tingkat usia maka pegawai di Kantor BPMPKB mayoritas usia 40-49 Tahun sebanyak 52 Orang atau 52,52 %. Kemudian yang berusia 50-59 Tahun sebanyak 32 Orang atau 32,32 %. Sedangkan yang berusia 30-39 Tahun hanya 10 Orang atau 10,10%. Dan untuk yang berusia 20-29 Tahun sebanyak 5 Orang atau 5,06% dari jumlah pegawai BPMPKB Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 :**  
**Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Tingkat Usia**

<b>No</b>	<b>Tingkat Usia</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	20-29 Tahun	5	5,06
2	30-39 Tahun	10	10,10
3	40-49 Tahun	52	52,52
4	50-59 Tahun	32	32,32
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013)

Kemudian, jika diurutkan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah karakteristik pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 :**  
**Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	43	43,44
2	Perempuan	56	56,56
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013)

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu adalah perempuan. Hal ini di buktikan dengan sebanyak 56,56% atau 56 Orang dari kaum hawa atau perempuan. Sedangkan 43,44% atau 43 Orang dari kaum adam atau Laki-laki.

Selain berdasarkan jenis kelamin, penulis juga akan menyajikan jumlah pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu berdasarkan tingkat agama. Dimana hasilnya adalah mayoritas pegawai tersebut adalah beragama Islam yaitu sebanyak 97,97% atau 97 orang. Sedangkan yang beragama kristen hanya 2 Orang atau sebanyak 2,03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 4.5 :**  
**Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Tingkat Agama**

No	Tingkat Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	97	97,97
2	Kristen	2	2,03
3	Budha	-	0
4	Hindu	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013)

#### **4.2.2 Bidang-Bidang yang ada di Kantor BPMPKB Kota Bengkulu**

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Sub bidang kelembagaan dan pemerintahan pemerintah
  - Sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat penanggulangan kemiskinan pemanfaatan TTG dan SDA
2. Bidang pemberdayaan perempuan
  - Sub bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan
  - Sub bidang organisasi peningkatan kualitas hidup perempuan (PHKP) dan kesejahteraan perempuan.
3. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
  - Sub bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
  - Sub bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Bidang kesejahteraan perlindungan ibu dan anak
  - Sub bidang perlindungan anak
  - Sub bidang kesejahteraan ibu dan anak yatim

#### **4.2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor BPMPKB**

Kantor BPMPKB Kota Bengkulu merupakan instansi pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, BPMPKB mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kantor BPMPKB mempunyai fungsi:

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan;
2. Melakukan koordinasi dalam menekan pertumbuhan penduduk,
3. Memberikan perlindungan terhadap ibu dan anak
4. Memberikan penyuluhan–penyuluhan yang berkaitan dengan keluarga berencana.
5. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
7. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kemasyarakatan;
8. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah pusat.

#### **4.2.4 Susunan Organisasi BPMPKB Kota Bengkulu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dalam Kota Bengkulu, Susunan Organisasi Pemerintah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
  - Kasubbag. Perencanaan
  - Kasubbag. Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
  - Kabid. Pemberdayaan Masyarakat
  - Kasubbid. Kelembagaan dan Pemerintahan kelurahan
  - Kasubbid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan, Pemanfaatan SDA.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)
  - Kabid. Pemberdayaan Perempuan
  - Kasubbid. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
  - Kasubbid. Organisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Perempuan
5. Bidang Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak (KIA)
  - Kabid. Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak
  - Kasubbid. Perlindungan Anak
  - Kasubbid. Kesejahteraan Ibu dan Anak
6. Bidang Keluarga Berencana (KB)
  - Kabid. Keluarga Berencana
  - Kasubbid. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - Kasubbid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

#### **4.3 Deskripsi Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Bengkulu**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penempatan Tenaga Penyuluh KB, terdapat sebanyak 40 orang tenaga penyuluh lapangan di Kota Bengkulu. Hal ini bisa kita lihat dalam bentuk tabel, berikut ini tabel yang dimaksud.

**Tabel 4.6 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan**  
**Keluarga Berencana (PLKB) Kota Bengkulu**

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Wilayah Binaan</b>
Gading Cempaka	1. Dra. Herkianti	-Kel. Cempaka Permai -Kel. Lingkar Barat
	2. Periani	-Kel. Sidomulyo
	3. Siti Linawati, BPA	-Kel. Padang Harapan
	4. Eko Akhmad Affandi, ST	-Kel. Jalan Gedang
Teluk Segara	1. Drs. Heru Susanto	-Kel. Pasar Baru -Kel. Berkas -Kel. Sumur Meleleh -Kel. Jitra
	2. Nurpajril Akmar, SE	-Kel. Tengah Padang -Kel. Pintu Batu -Kel. Pasar Melintang
	3. Nurlelawati	-Kel. Bajak -Kel. Kampung Bali -Kel. Malabero
	4. Drs. Nandang	-Kel. Kebun Roos -Kel. Kebun Keling -Kel. Pondon Besi
Selebar	1. Kosasi	-Kel. Pagar Dewa
	2. Babul Almi, SH	-Kel. Betungan -Kel. Sumur Dewa
	3. Lisa Menawati	-Kel. Pekan Sabtu
	4. Hermawati, S.Sos	-Kel. Sukarami
	5. Angkus Masnun, SH	-Kel. Bumi Ayu
	6. Nurmawati, SE	-Staf BPMPKB
Muara Bangkahulu	1. Dra. Luthvi Woro H	-Kel. Bentiring -Kel. Bentiring Permai
	2. Liza Parsita	-Kel. Rawa Makmur Permai
	3. Irlan	-Kel. Rawa Makmur
	4. Heri Rifai	-Kel. Kandang Limun -Kel. Pematang Gubernur -Kel. Beringin Raya
Ratu Agung	1. Ir. Neli Gustini	-Kel. Kuala Lempuing -Kel. Nusa Indah
	2. Murni	-Kel. Sawah Lebar Baru
	3. Erwinsayah Siregar	-Kel. Sawah Lebar
	4. Drs. Dedi Januardi	-Kel. Kebun Tebeng
	5. Giswanti	-Kel. Kebun Beler -Kel. Kebun Kenanga
	6. Subaidah	-Kel. Tanah Patah

Ratu Samban	1. Emmerita, S.Sos	-Kel. Anggut Atas -Kel. Padang Jati
	2. Suliah, S.Sos	-Kel. Anggut Dalam -Kel. Penurunan
	3. Hemalia Deta, S.Sos	-Kel. Anggut Bawah -Kel. Kebun Geran
	4. Jadri, S.Pd	-Kel. Kebun Dahri -Kel. Belakang Pondok
	5. Handri	-Kel. Pengantungan
Singaran Pati	1. Rosliana, BA	-Kel. Timur Indah
	2. Dra. Marhamah	-Kel. Panorama -Kel. Jembatan Kecil
	3. Nahnul Iman, SE	-Kel. Dusun Besar -Kel. Lingkar Timur
	4. Ir. Retno M	-Kel. Padang Nangka
Kampung Melayu	1. Dra. Nasyahati	-Kel. Muara Dua -Kel. Kandang Mas
	2. Jariah, SKM	-Kel. Padang Serai -Kel. Kandang
	3. Indra Jaya, SE	-Kel. Sumber Jaya
	4. Sudirman	-Kel. Teluk Sepang

(Sumber : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 55 Tahun 2013).

Data di atas menunjukkan bahwa setiap penyuluh yang bertugas di masing-masing kecamatan mempunyai wilayah binaan yang berbeda. Sebanyak 40 orang penyuluh tersebar di seluruh 9 Kecamatan dan 72 Kelurahan. Penyuluh tersebut mempunyai latar belakang pendidikan, golongan kepangkatan dan usia yang berbeda-beda. Jika diurutkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	S2	1	2,5
2	S1	25	62,5
3	D3	2	5,00
4	D1	2	5,00
5	SLTA Sederajat	10	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013).

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penyuluh KB adalah sarjana yaitu strata 1 (S1). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah tenaga PLKB yang tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 Orang atau 62,5%. Dan sebanyak 10 Orang atau 25,00% untuk tingkat SLTA/Sederajat. Untuk D3 dan D1 masing-masing sebanyak 2 orang atau hanya 5% saja. Dan untuk yang 2,5% adalah tingkat S2 sebanyak 1 orang saja. Angka tersebut menunjukkan bahwa seorang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dibekali dengan latar belakang pendidikan yang tinggi untuk menyampaikan tentang pentingnya KB bagi kehidupan masyarakat saat ini.

Selain dari tingkat pendidikan, penulis juga akan menyajikan data tenaga PLKB berdasarkan tingkat golongan kepangkatan. Untuk mengetahuinya, berikut adalah data yang dimaksud yaitu jumlah tenaga PLKB Kota Bengkulu berdasarkan tingkat golongan.

**Tabel 4.8 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Golongan**

No	Tingkat Kepangkatan Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	IV /a	8	20,00
2	III/d	16	40,00
3	III/c	5	12,5
4	III/b	3	7,5
5	III/a	3	7,5
6	II/b	4	10,00
7	II/a	1	2,5
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013).

Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 40,00% dari jumlah tenaga PLKB berada pada golongan III/d atau sebanyak 16 orang. 20,00% untuk golongan IV/a atau sebanyak 8 Orang. 12,5% atau 5 orang untuk golongan III/c, 10,00% untuk golongan II/b dan 7,5% atau sebanyak 3 orang untuk golongan III/b dan III/a. Sedangkan untuk golongan II/a hanya 1 orang saja atau 2,5% dari jumlah PLKB di Kota Bengkulu.

Selain berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, jika diurutkan berdasarkan tingkat usia, maka datanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	1	2,5
2	30-39 Tahun	4	10,00
3	40-49 Tahun	25	62,5
4	50-59 Tahun	10	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013).

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas tenaga PLKB Kota Bengkulu berusia 40-49 Tahun sebanyak 62,5% atau 25 Orang. Dan untuk yang berusia 50-59 Tahun ada sebanyak 25,00% atau 10 Orang, sedangkan untuk yang berusia 30-39 Tahun sebanyak 10,00% atau 4 Orang. Dan yang terakhir untuk kategori usia 20-29 Tahun sebanyak 1 Orang saja atau 2,5% dari jumlah tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

**Tabel 4.10 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	16	40,00
2	Perempuan	24	60,00
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013).

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh KB di Kota Bengkulu adalah perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah tenaga PLKB yang berjenis Kelamin Perempuan 60,00% atau 24 Orang. Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40% atau 16 Orang. Hal ini sama dengan jumlah pegawai BPMPKB Kota Bengkulu yang mayoritas pegawainya berjenis kelamin perempuan.

Tidak lupa selain data jumlah PLKB berdasarkan Jenis kelamin, penulis sajikan tabel tenaga PLKB berdasarkan tingkat agama. Untuk lebih jelasnya berikut data yang dimaksud.

**Tabel 4.11 :**  
**Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu**  
**Berdasarkan Tingkat Agama**

No	Tingkat Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	38	95,00
2	Kristen	2	5,00
3	Budha	-	0
4	Hindu	-	0
5	Khatolik	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Data BPMPKB, 2013).

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penyuluh KB di Kota Bengkulu mempunyai kepercayaan agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari ada sebanyak 95,00% atau 38 Orang penyuluh KB beragama islam. Dan hanya 5,00% atau sebanyak 2 orang saja yang beragama Kristen.

## BAB V

### HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan ini merupakan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, maka dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penulisan yang penulis dapatkan selama proses penulisan pada bulan November sampai Desember 2013 yang berbentuk fakta dan data. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penulisan di lapangan, dan selanjutnya akan mendeskripsikan untuk kemudian untuk dianalisis.

#### 5.1 Hasil Penulisan

##### 5.1.1 Karakteristik Informan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluh lapangan keluarga berencana, maka penulis melakukan wawancara kepada 11 informan yang terdiri dari petugas penyuluh KB, pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu, Kader Penyuluh, Bidan dan masyarakat Bengkulu atau peserta KB yang berada di Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini karakteristik informan berdasarkan kedudukan masing-masing.

**Tabel 5.1 :**  
**Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan**  
**Tingkat Kedudukan**

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala BPMPKB	1	9,09
2	Kasubbid KB	1	9,09
3	Penyuluh KB/PLKB	2	18,18
4	Kader Penyuluh	2	18,18
5	Peserta KB	3	27,28
6	Bidan	1	9,09
6	Tokoh Masyarakat	1	9,09
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013 )

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa informan yang diambil dari setiap kedudukan yang ada di Kantor BPMPKB Kota Bengkulu adalah Kepala BPMPKB 1 Orang atau 9,09 %, Kasubbid KB 1 Orang atau sebanyak 9,09 %, Penyuluh KB/PLKB sebanyak 2 orang atau 18,18 %. Kemudian Kader Penyuluh yang terdiri dari 2 orang atau sebanyak 18,18%. peserta KB sebanyak 3 orang atau 27,28%. Bidan sebanyak 1 Orang atau 9,09%. Serta Tokoh Masyarakat sebanyak 1 Orang atau 9,09%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah informan yang diambil sudah sangat cukup, baik dari pihak BPMPKB maupun peserta KB. Maka, diharapkan informan yang ada di pihak pemerintah mampu memahami arti dari Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Kemudian untuk lebih lanjut, untuk mengetahui karakteristik informan ditinjau menurut usia akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 5.2 :**  
**Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan**  
**Tingkat Usia**

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	2	18,18
2	30-39 Tahun	3	27,28
3	40-49 Tahun	4	36,36
4	>50 Tahun	2	18,18
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>

*(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya informan berdasarkan usia rata-rata masih berusia pada usia produktif antara 20-50 tahun. Dengan jumlah terbanyak usia 40-49 tahun sebanyak 4 orang atau 36,36%, yang diikuti informan

berusia 30-39 tahun sebanyak 3 orang atau 27,28%, dan informan berusia 20-29 tahun sebanyak 2 orang atau 18,18%, serta informan yang berusia di atas 50 tahun 2 orang atau 18,18%. Sehingga dapat dipastikan bahwa informan yang diambil sebagai informan penulisan masih berusia produktif dan banyak peluang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penulis dalam menggali informasi.

Adapun karakteristik informan ditinjau dari tingkat pendidikan akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 5.3 :**  
**Karakteristik Informan Penulisan berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA/Sederajat	4	36,36
2	D3	2	18,18
3	S1	4	36,36
4	S2	1	9,09
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>

*(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 informan terdapat sebanyak 4 orang S1 atau 36,36%, SLTA/ sederajat sebanyak 4 orang atau hanya 36,36%, D3 sebanyak 2 orang atau 18,18%, serta S2 sebanyak 1 orang atau 9,09%. Jadi, karakteristik informan menurut tingkat pendidikan sudah memenuhi syarat. Artinya tingkat pendidikan informan rata-rata memenuhi kriteria sumber daya manusia yang jelas mengenal baca tulis dan memiliki pengetahuan tentang apa yang akan penulis tanyakan.

Selain itu, jika informan ditinjau dari jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 :**  
**Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan**  
**Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ibu Rumah Tangga	3	27,28
2	Wiraswasta	3	27,28
3	PNS	5	45,44
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan informan terdiri dari 11 jumlah informan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 Orang atau 45,44%. Sedangkan untuk wiraswasta sebanyak 3 orang atau sebanyak 27,28%, serta yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 3 Orang atau 27,28%.

Selain itu, berikut ini data jumlah informan berdasarkan jenis kelamin. Berikut data yang dimaksud :

**Tabel 5.5 :**  
**Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	5	45,44
2	Perempuan	6	54,56
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013).

Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Hal ini sesuai dengan data di atas, untuk perempuan sebanyak 6 orang atau 54,56%. Sedangkan untuk laki-laki sebanyak 5 orang saja atau 45,44%.

### **5.1.2 Pelaksanaan Tugas PLKB**

Dalam penulisan ini variabelnya adalah Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu. Pelaksanaan Tugas PLKB dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Penyuluh lapangan yang berada di Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek penulisan dalam penulisan ini yaitu meliputi 5 aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelola program, pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan. Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan selama penulisan, hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

#### **5.1.2.1 Perencanaan Tugas PLKB**

Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang dimaksud ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu dalam memberikan tugas kepada penyuluh lapangan atau PLKB untuk

mengadakan penyuluhan tentang KB kepada masyarakat khususnya di Kota Bengkulu.

Dalam perencanaan tugas PLKB akan diketahui adalah bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh BPMPKB kepada PLKB ? dan seperti apa bentuk-bentuk perencanaan yang dibuat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada langkah-langkah perencanaan berikut ini.

1. Penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data
2. Penentuan masalah prioritas
3. Penyusunan rencana kerja
4. Penyusunan jadwal.

Hal pertama yang penulis tanyakan adalah bagaimana penguasaan/identifikasi potensi wilayah sejak pengumpulan data yang dilakukan BPMPKB kepada PLKB sebelum merencanakan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara penulisan, seorang PLKB di Kecamatan Teluk Segara, Bapak Drs. Nandang mengatakan bahwa:

“.....cara penguasaan/identifikasi wilayah kerja yang dilakukan pertama-tama adalah pendataan pasangan usia subur dan tidak hanya PUS saja yang kami data tapi remaja, karena mayoritas penduduk di setiap kecamatan biasanya lebih dominan ke remaja, namun kami tetap memprioritasnya pada pasangan usia subur...”(*Wawancara Penulisan, November 2013*).

Masih dari hasil wawancara dengan seorang PLKB di Kecamatan Teluk Segara Bapak Drs. Heru Susanto, beliau menyampaikan hal yang senada dengan Bapak Nandang tentang penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja sebelum merencanakan kegiatan adalah;

“...caranya sebelum merencanakan kegiatan dalam melakukan penyuluhan PLKB melakukan pendataan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan hal ini dimaksudkan agar nantinya di dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, atau sesuai dengan kebutuhannya....”(Wawancara Penulisan, November 2013).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja harus dilakukan pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar nantinya sebelum merencanakan kegiatan PLKB sudah mendapatkan suatu gambaran apa-apa saja yang akan dilaksanakan nantinya di lapangan dalam merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan isi pedoman pengelolaan (Dalam BKKBN, 2012:25) yang mengatakan bahwa : “ mengidentifikasi potensi dan masalah di wilayah untuk memetakan potensi yang ada dimiliki suatu daerah, antara lain meliputi: Jumlah remaja, jumlah pasangan usia subur (PUS) yang memiliki anak remaja (ber-KB dan yang tidak ber-KB)”. Penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja dilakukan oleh para Kader Penyuluh, PLKB yang merupakan perpanjangan tangan dari BPMPKB.

Lalu penulis menanyakan mengenai bagaimana penentuan masalah prioritas yang dihadapi PLKB dalam perencanaan kegiatan penyuluhan KB nasional, dan apa yang harus dilakukan. PLKB Teluk Segara Bapak Nandang mengatakan:

“...caranya dengan meninjau ke lapangan dan melihat kondisi lapangan seperti apa, dengan begitu kita dapat menentukan masalahnya, tapi biasanya untuk di Bengkulu sendiri yang menjadi masalah prioritas adalah dalam pelaksanaannya, untuk menentukan

waktu, dan untuk pemahaman tentang ber-KB sendiri tentu masyarakat kota sudah memahami semua itu, karena akses untuk mendapatkan informasi sudah lebih gampang ketimbang di desa....”  
(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nandang, diketahui bahwa penentuan masalah prioritas dalam menyusun perencanaan harus dilakukan pengamatan dan melakukan peninjauan-peninjauan masalah yang ada di lapangan. Hal ini bertujuan agar dalam perencanaan kegiatan nantinya dapat memberikan solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai bagaimana penyusunan rencana kerja PLKB pada pihak kantor BPMPKB, hasil wawancara dengan Kasubid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bapak Drs. Siharman menjelaskan bahwa :

“....sebelum menyusun rencana kerja kita harus memahami terlebih dahulu keadaan lapangan seperti apa.setelah kita sudah mengetahui baru kita menyusun rencana kerja, baru nantinya kita rapatkan untuk membuat rencana kerja bagi pegawai yang ada di lapangan sesuai dengan hasil rapat tentunya harus sesuai dengan bidang kita....”  
(*Wawancara Penulisan, November 2013*).

Dari hasil wawancara penulis di atas diketahui bahwa sebelum melakukan penyusunan rencana kerja PLKB harus memahami keadaan lapangan dan nantinya dari hasil itu baru dirapatkan dengan BPMPKB terutama bidang KB yang menaungi PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional. Masih dari hasil wawancara hal senada disampaikan oleh Ibu Ir. Yenita Saiful, M.Si, selaku kepala BPMPKB Kota Bengkulu, beliau mengatakan :

“...sebelum melakukan penyusunan rencana kerja PLKB dan bidangnya melakukan rapat untuk menentukan apa yang nantinya akan dilakukan di lapangan setelah sudah mendapatkan hasil baru dari BPMPKB mengeluarkan SK untuk PLKB yang bertugas di lapangan...”(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam merencanakan rencana kerja antara PLKB dan BPMPKB melakukan rembug dalam menyusun rencana kerja. Hal ini dimaksudkan agar PLKB dan BPMPKB dalam pelaksanaan penyuluhan nantinya tetap pada satu VISI dan tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan. Masih dari hasil wawancara, penulis mencoba menanyakan dengan Bapak Nandang selaku PLKB. Apakah dalam penyusunan rencana kerja PLKB memiliki rencana kerja sendiri. Beliau mengatakan bahwa:

“...memang betul dalam menyusun rencana kerja kami selaku PLKB melakukan rapat dengan kantor ya wajar-wajar saja karena di sanalah tempat kami bernaung, kami menjalankan tugas kami sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada kami, kalo dari kami memang ada, jelas ada rencana kerja yang kami buat sendiri tapi semua itu kami sesuaikan dengan program yang telah ditetapkan. Jadi tidak melenceng dari yang telah dirapatkan, maksudnya rencana kerja dari kami ini strategi kami di lapangan dalam melaksanakan tugas. dari semua itu nantinya pihak BPMPKB mengeluarkan SK yang disahkan oleh kepala badan. Pada saat di lapangan kami juga melakukan pengkaderan dan menjalin kemitraan agar nantinya mempermudah kami dalam menjalankan tugas....” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaannya PLKB tidak hanya dalam menjalankan program dan menyusunnya berdasarkan hasil rapat semata, melainkan juga memiliki

rencana kerja sendiri di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk strategi atau mempermudah PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional tanpa melupakan hasil kebijakan yang telah dirapatkan sehingga dapat tercapai target yang telah direncanakan.

Kemudian penulis mencoba menanyakan mengenai penyusunan jadwal kepada PLKB dalam rencana kegiatan pelaksanaan program yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang penulis tanyakan adalah penyusunan jadwal. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Heru Susanto selaku PLKB beliau mengatakan:

“...jadwal kegiatan semuanya telah dibicarakan pada saat rapat penyusunan rencana kerja. Namun kami juga sudah menyusun rencana kerja kami sendiri, cuman tetap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah kami dalam mensiasati kendala-kendala yang ada dilapngan nantinya. Jadi kalo masalah jadwal boleh sudah ditentukan, namun dalam pelaksanaannya bisa saja berubah karena adanya hambatan-hambatan yang ada di lapangan....” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaannya semuanya telah dirapatkan di BPMPKB dan PLKB sendiri, diterangkan oleh Bapak Heru Susanto tentang adanya rencana kerja sendiri yang dilakukan oleh PLKB boleh-boleh saja namun harus sesuai dengan bidang dan apa yang telah ditetapkan. Jadi jelas dalam perencanaan jadwal adalah hal penting yang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya nantinya dapat memenuhi target yang telah direncanakan.

Penyusunan rencana kerja penyuluh dilakukan berdasarkan program kerja dari kantor badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana melalui bidang keluarga berencana dan sesuai dengan hasil yang didapat antara staf bidang KB dengan PLKB. Bentuk-bentuk perencanaan yang dibuat oleh BPMPKB dan bentuk perencanaan yang dibuat oleh PLKB. Adapun bentuk perencanaan yang dibuat oleh BPMPKB adalah berbentuk SK. Sedangkan untuk yang dibuat oleh PLKB yaitu melalui pembentukan kader dan mitra dalam pelaksanaan tugas nantinya.

#### **5.1.2.2 Pengorganisasian Tugas PLKB**

Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus pengorganisasian merupakan suatu proses mengorganisasikan orang-orang untuk melakukan misi utama mereka. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah PLKB dalam mensukseskan program KB nasional yang telah ditentukan. Dalam aspek yang kedua ini diketahui bahwa pengorganisasian PLKB meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Memperluas pengetahuan dan wawasan
2. Rekrutmen kader
3. Mengembangkan kemampuan dan memerankan kader serta mitra
4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader

Maka untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan apakah ada pengorganisasian yang dilakukan PLKB, telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijelaskan di atas. Salah seorang PLKB Bapak Drs, Nandang menjelaskan:

“...pengorganisasian ini dimaksudkan untuk membantu meringankan tugas kami selaku PLKB di lapangan, jadi nantinya diharapkan ada kemudahan bagi kami dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat ini. Hal ini kami lakukan karena tidak memungkinkan bagi kami yang jumlahnya sedikit ini bisa menjalankan tugas untuk lebih efektif. Itulah kenapa kami lakukan pengorganisasian ini, salah satunya...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nandang di atas terlihat bahwa dalam mensosialisasikan program yang telah ditentukan perlu dilakukan pengorganisasian hal ini dimaksudkan untuk mempermudah PLKB dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat. Pengorganisasian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang dibuat di atas. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan PLKB, maka penulis mencoba menanyakan dengan salah satu PLKB. Bapak Heru Susanto menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah :

“...dengan cara Memperluas wawasan dan pengetahuan hal ini dimaksudkan agar dalam mensosialisasikan program KB nasional nantinya kami sudah memahami konsep dari tugas yang akan kami laksanakan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari wawancara dengan Bapak Heru Susanto di atas terlihat gambaran bahwa PLKB dituntut harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya,

hal ini dimaksudkan agar nantinya memberikan kemudahan PLKB yang bertugas dilapangan dalam menjalankan tugas dan perannya. Masih dari hasil wawancara dengan seorang PLKB yaitu Bapak Nandang, beliau menyampaikan hal yang senada dengan Bapak Heru Susanto tentang langkah-langkah didalam pengorganisasian salah satunya dengan cara memperluas wawasan dan pengetahuan, beliau menjelaskan:

“...tidak serta merta PLKB itu memahami tugas dan fungsinya di lapangan, maka dari itu PLKB dituntut untuk dapat lebih lagi mengembangkan pengetahuannya...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Jadi sangat jelas berdasarkan pernyataan di atas bahwasannya langkah pertama yang dilakukan dalam pengorganisasian yang dilakukan PLKB ialah dengan cara memperluas wawasan dan pengetahuan terutama PLKB itu sendiri. Lalu penulis menanyakan mengenai langkah yang kedua yaitu rekrutmen kader yang dilakukan PLKB. Bapak Heru Susanto mengatakan:

“...jadi dalam merekrut kader kami melihat dari beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan, keaktifan dalam berorganisasi, dan bisa juga dari LSM...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari wawancara dengan Bapak Heru Susanto di atas terlihat bahwa dalam perekrutan kader PLKB harus dengan dasar dan pertimbangan yang matang hal ini terlihat dari yang beliau sampaikan harus meninjau dari segi pendidikan, keaktifan berorganisasi, atau dari LSM. Hal ini dimaksudkan agar kader PLKB yang nantinya akan bertugas setidak-tidaknya sudah mampu memahami struktur dari tugas yang akan dilakukan, tentu sebelum

melaksanakan perannya sebagai kader PLKB sudah dibekali dengan wawasan dan pengetahuan.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang kader PLKB Kelurahan Kandang Limun Ibu Eva Neliani, beliau mengatakan:

“...jadi kalo ayuk dulu dek sebelum gabung jadi kader PLKB, ayuk memang aktif dikeorganisasian, sering jadi pengisi materi disetiap kegiatan. Dulu ayuk ditawari untuk jadi kader PLKB dan dikasi materi dan pemahaman tentang KB, pelatihanla, tapi kalau SK kami memang tidak ada cuman data kami masuk ke BPMPKB sebagai kader. Hal itu dimasukdkan untuk kami menerima uang tanda terima kasih, sampai sekarang masih ayuk aktif membantu mensosialisasikan program KB sebagai kader...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan di atas bahwa dalam rekrutmen kader memang ada yang harus diperhatikan. Seperti dari segi pendidikan pengalaman beorganisasi semua itu dilakukan demi tercapainya kesuksesan program yang akan dilaksanakan nantinya.

Kemudian penulis menanyakan tentang mengembangkan kemampuan dan memerankan kader serta mitra. Dengan Bapak Nandang selaku PLKB beliau mengatakan bahwa:

“...jadi kami selaku PLKB harus dapat memerankan kader dan mitra yang terkait dalam menjalankan atau mensosialisasikan program KB sehingga dapat tercapai dengan baik, mitra disini maksudnya seperti pukesmas, bidan-bidan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada dimana tempat kami ditugaskan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa pada langkah yang ketiga ini PLKB harus dapat memanfaatkan dan memerankan kader yang

telah dibentuk dan menjalin hubungan kerja sama dengan kemitraan yang ada, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pelaksanaannya dalam mensukseskan program yang telah dibuat terutama KB nasional.

Lalu penulis mencoba menanyakan langkah yang terakhir pada aspek peorganisasian ini, diketahui bahwa pada langkah yang ketiga tadi PLKB harus dapat memerankan kader yang telah dibentuk dan dapat mengembangkan kemampuan kader dan mitra. Dalam langkah yang keempat ini dijelaskan bahwa PLKB harus memberikan pelatihan kepada kader hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader. Maka penulis mencoba menanyakan pada seorang PLKB Bapak Nandang mengenai pelatihan yang diberikan oleh PLKB, beliau menyatakan bahwa:

“ ....memberikan pelatihan kepada Kader Penyuluh adalah hal yang wajib dilakukan hal ini bermaksud agar Kader Penyuluh benar-benar memahami dan menjalankan fungsinya sebagai kader dalam mensosialisasikan program yang telah diberikan....” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa upaya yang dilakukan PLKB dalam memperlancar proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan dan pemahaman kepada Kader Penyuluh yang sudah dibentuk, hal ini bertujuan agar Kader Penyuluh dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, itulah mengapa diadakanya pelatihan untuk Kader Penyuluh. Selain itu tujuan dari diberikannya pelatihan ini agar nantinya dalam mensosialisasikan program KB nasional yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif.

### 5.1.2.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program PLKB

Pada aspek yang ketiga ini mengenai pelaksanaan dan pengelolaan program yang dilakukan PLKB dengan cara peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelolaan program KB dengan mengadakan, Penyiapan kader dan mitra, Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada kader serta mitra, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dasar-dasar serta metode dan teknik penyuluhan sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan.

Untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan apakah penyiapan kader dan mitra yang dilakukan oleh PLKB untuk meningkatkan kapasitas Kader Penyuluh dalam pelaksanaannya sebagai penyuluh. Bapak Heru Susanto sebagai PLKB di Kecamatan Teluk Segara menjelaskan bahwa:

“...langkah pertama sebelum melaksanakan kegiatan yang dilakukan perlu diadakan penyiapan kader dan mitra, hal ini dimaksudkan agar kader dan mitra nantinya memiliki kesiapan dalam mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan nantinya...”  
(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan program hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan penyiapan kader dan mitra, hal ini sangat penting dilakukan mengingat kegiatan penyuluhan bermaksud merubah perilaku negatif dari individu atau masyarakat ke arah yang positif, sehingga mereka tahu, mampu, dan mau melaksanakan cara-cara hidup sehat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat lingkungan. Lalu penulis mencoba menanyakan hal yang sama

pada salah satu Kader Penyuluh di Kelurahan Kandang Limun Ibu Eva Neliani, berikut penuturan beliau:

“...sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan kami harus melakukan persiapan dulu dek agar nantinya pas pada saat di lapangan kami tidak menemui kendala yang begitu bearti, dan kami juga harus menjaga komonikasi yang telah dibentuk dengan kemitraan agar kami juga dapat menentukan kapan pelaksanaan itu harus dilakukan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan kader dan mitra adalah hal pokok yang harus dilakukan hal ini dimaksudkan agar proses yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling menjaga hubungan yang baik dengan kemitraan. Kemitraan disini maksudnya adalah lembaga pemerintahan maupun swasta disetiap kecamatan yang memiliki visi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa penyuluhan yang akan dilakukan adalah berbagai kegiatan yang terencana dan tearah yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, keluarga, atau masyarakat.dalam kehidupan perlu diketahui ada tiga unsur prilaku yang harus dirubah untuk berhasilnya kegiatan penyuluhan yaitu meliputi pengetahuan, sikap, tindakan.unsur-unsur inilah yang menjadi tugas pokok seorang penyuluh yang mana harus dapat merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan kearah yang lebih baik lagi. Jika semua ini terjadi maka penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh dapat dikatakan berhasil sebab penyuluh dapat merubah prilaku seseorang dengan menanamkan pengertian yang baik.

Kemudian penulis mencoba menanyakan tentang Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional. Bapak Nandang selaku PLKB Kecamatan Teluk Segara menjelaskan bahwa:

“ ...ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pemudah, faktor pendukung, faktor penguat atau pendorong. Faktor pemudah maksudnya pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki masyarakat. Faktor yang kedua atau pendukung maksudnya, masalah dana, sarana, dan tenaga. Dan faktor yang terakhir atau penguat/pendorong maksudnya partisipasi dari tokoh agama, kepala desa, orang tua dan sebagainya...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan dan pengembangan program ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor pemudah yang mana dimaksudkan disini adalah adanya pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki individu/masyarakat. Seorang akan cepat berubah karena telah ada dasar pengetahuan dan pengalaman positif dalam dirinya.

Lalu penulis mencoba menanyakan hal yang sama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pengembangan program yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional Bapak Heru Susanto juga menjelaskan hal yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nandang. Bapak Heru Susanto menjelaskan bahwa :

“...faktor pertama yang dibutuhkan PLKB adalah Faktor pemudah yang mana pendidikan, pengetahuan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh PLKB dalam menjalankan tugasnya sebagai PLKB...”(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*)

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa seorang PLKB harus mampu merubah sikap/prilaku seseorang dengan menanamkan pengertian yang baik, Faktor yang pertama ini sangat menuntut bahwa seorang PLKB harus dapat memahami konsep atau materi yang sesuai dengan tugasnya sebagai PLKB. Namun masyarakat juga harus dapat memahami konsep-konsep materi yang diberikan oleh PLKB. Dengan kata lain PLKB/Kader Penyuluh serta mitra harus saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai kesuksesan yang telah ditargetkan atau rencanakan.

Faktor kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung ini sangat dibutuhkan oleh PLKB dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh karena tanpa adanya Faktor yang kedua ini mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan optimal karena Faktor yang kedua ini berkaitan dengan dukungan dana, sarana, dan tenaga yang tersedia. Menurut Bapak Nandang beliau mengatakan bahwa :

“.... Di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan ada hal pokok yang tidak bisa dilupakan yaitu paktor pendukung kegiatan seperti dana, sarana, dan bantuan tenaga yang tesedia seperti kader dan mitra...” (*Wawancara Penulisan, Desemberi 2013*).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Nandang selaku PLKB, dengan adanya faktor pendukung seperti anggaran dana, sarana, dan bantuan tenaga yang ada, hal ini sangat berdampak positif dalam pelaksanaan tugas yang akan PLKB serta mitra laksanakan. Jadi sangat jelas faktor pendukung ini sangat dibutuhkan bagi PLKB dalam

melaksanakan tugasnya jika dana ada, sarana ada, tenaga yang membantu ada tentu pelaksanaannya akan mudah.

Dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan dan pengembangan program adalah faktor penguat atau pendorong hal ini maksudnya adalah pengaruh atau dorongan yang diberikan oleh tokoh agama, Lurah atau Kepala Desa, orang tua, dan sebagainya tentang pentingnya mengikuti penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional. Kemudian penulis menanyakan kepada Kader Penyuluh Kelurahan Rawa makmur Permai Bang Andi beliau mengatakan :

“ ...peran tokoh-tokoh agama, masyarakat dan sebagainya sangat dibutuhkan karena sangat membantu PLKB dalam melaksanakan tugasnya....” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa peran tokoh-tokoh masyarakat sangat dibutuhkan oleh PLKB, hal ini dimaksudkan agar PLKB dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengenalkan program yang sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu pelaksanaan tugas sebagai penyuluh KB. Lalu penulis mencoba mencari kebenaran dan menanyakan kepada kader tentang pendekatan yang dilakukan PLKB. Salah satu cara pelaksanaan tugas PLKB dengan cara melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Samsuri membenarkan, berikut penuturan beliau :

“... memang benar penyuluh melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mempermudah penyuluh dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penyuluh KB...”(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Samsuri yang membenarkan bahwa PLKB memang melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Jadi faktor yang ketiga ini juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang akan dicapai penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh. dan menjadi strategi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai PLKB.

Selain tiga faktor tadi ada hal lain yang harus diperhatikan PLKB dalam melakukan penyuluhan kepada individu/masyarakat, dalam melakukan penyuluhan atau menyampaikan informasi akan ada tahapan penerimaan informasi, maksudnya disini adalah penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada individu atau masyarakat akan menerima informasi yang disampaikan penyuluh berbeda dengan kata lain masyarakat/individu harus mengadopsi penuh apa yang disampaikan penyuluh atau yang sering dikenal sebagai proses adopsi. Untuk mengetahui tahapan apa saja yang harus diperhatikan oleh PLKB dan Kader Penyuluh serta mitra, maka menurut Bapak Heru Susanto sebagai PLKB mengatakan bahwa :

“... tahapan yang harus diperhatikan oleh seorang PLKB adalah kesadaran dari individu/masyarakat saat informasi disampaikan sehingga objek tergugah kesadarannya akan arti dan informasi yang disampaikan, tahapan minat yang timbul dari individu/masyarakat atas informasi yang disampaikan penyuluh, tahap selanjutnya

menilai bila peserta mulai menimbang buruk baiknya dari penjelasan yang disampaikan penyuluh dan mulai mendapat respon yang positif maka tahap selanjutnya peserta akan mencoba melaksanakan ajuran yang telah disampaikan penyuluh kepada peserta, guna mengapa penyuluh harus mengerti tahapan ini ialah agar penyuluh dapat mengetahui atas apa yang penyuluh lakukan dapat diterima dengan baik oleh peserta...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2014*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh, penyuluh harus memperhatikan tahapan-tahapan yang terjadi. Hal ini dikarenakan agar penyuluh dapat mengetahui apakah informasi yang telah disampaikan telah diserap dengan baik oleh individu/masyarakat.

Dari dasar-dasar yang dilakukan penyuluh di atas lalu penulis mencoba mengupas metode dan teknik penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari penjelasan ini adalah diharapkan agar penulis dapat memahami cara (metode) dan teknik pelaksanaan yang dilakukan penyuluh. Untuk lebih lanjutnya tujuan dengan dibahasnya metode dan teknik yang dilakukan penyuluh kita harus memahami terlebih dahulu tujuan dari metode dan teknik yang digunakan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai PLKB. PLKB harus mengetahui apa yang dimaksud dengan metode dan teknik, metode artinya cara, dan teknik artinya upaya yang dilakukan penyuluh untuk bisa melaksanakan secara baik cara yang akan digunakan dalam menyampaikan informasi .

Lalu penulis menjoba menanyakan metode dan teknik yang dilakukan PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai PLKB dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan KB nasional. Menurut penuturan Bapak Nandang selaku PLKB, beliau mengatakan :

“...tentu kita dalam mensosialisasikan KB dengan menggunakan cara-cara yang biasa dilaksanakan di lapangan, cara yang sering kami gunakan dalam menyampaikan informasi dengan cara ceramah, demonstrasi, dan konseling, karena cara itulah yang lebih efektif di lakukan...” (*Wawancara Penulis, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya metode dan teknik yang sering digunakan oleh PLKB dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh yaitu dengan cara melakukan ceramah, demonstrasi, dan konseling karena hal ini dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penulis mencoba menanyakan hal yang sama kepada Kader Penyuluh Bapak Andi beliau menuturkan bahwa :

“...sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas penyuluh, yaitu pertama dengan merubah pengetahuan, seperti ceramah, kuliah, wawancara, konseling, seminar. Yang kedua dengan cara merubah sikap hal ini seperti curah pendapat, pemutaran film, pameran, tanya jawab, dan yang terakhir merubah tindakan dengan cara pelatihan, demonstrasi atau lebih sering dikenal dengan langsung praktek, namun dari sekian banyak metode dan teknik itu yang paling sering kami gunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, dan konseling...” (*Wawancara Penulis, Desember 2013*).

Dari 2 jawaban di atas penulis mendapat jawaban bahwa metode dan teknik yang paling sering digunakan oleh PLKB dalam melaksanakan

tugasnya sebagai penyuluh yaitu dengan menggunakan metode dan teknik sebagai berikut :

1. Metode ceramah
2. Metode demonstrasi,dan
3. Metode konseling

Karena metode ini yang dinilai memberikan dampak yang positif baik untuk PLKB sendiri terutama peserta yang dapat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh PLKB, dan dinilai lebih gampang dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penulis akan membahas dan menanyakan tentang metode dan teknik yang digunakan PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh secara satu persatu dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam pelaksanaannya tadi diketahui bahwa dari sekian banyak metode yang digunakan ada tiga metode yang paling sering digunakan, yang pertama adalah “ metode ceramah”. Salah seorang Kader Penyuluh Kandang Limun Ibu Eva Neliani menjelaskan bahwa :

“...Ceramah salah satu cara penyuluhan yang dilakukan dimana kita menjelaskan secara lisan kepada sekelompok sasaran dengan menggunakan alat bantu peraga (poster, brosur, dan lain sebagainya) dengan disertai diskusi atau Tanya jawab...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang Kader Penyuluh Ibu Eva yang menjelaskan bahwa salah satu cara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas penyuluh yaitu dengan cara ceramah, beliau juga

menjelaskan bahwa agar ceramah ini dapat berjalan dengan baik maka harus ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, beliau menjelaskan :

“...Yaitu dengan persiapan terlebih dahulu, persiapan itu meliputi, menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan sasaran, mempersiapkan materi dan alat peraga yang akan dipakai, menentukan waktu/lamanya penyampaian, menentukan tempat dan pada pelaksanaannya kami biasanya melakukan dengan teknik yang biasa digunakan pada saat ceramah dengan mengutamakan maksud dan tujuan yang akan kita akan jelaskan...” (*Wawancara Penulisan. Desember 2013*).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh ibu eva sebagai Kader Penyuluh yang menjelaskan persiapan yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan kegiatan diperoleh gambaran bahwa sebelum melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan program KB nasional. PLKB, Kader Penyuluh, dan mitra melakukan persiapan terlebih dahulu hal ini agar dalam pelaksanaannya PLKB sudah dapat memosisikan dirinya dengan baik dan menyampaikan informasi dengan baik juga sehingga tercapai kesuksesan program yang ingin dicapai.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai metode yang kedua yaitu metode demonstrasi yang digunakan penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya dalam mensosialisasikan program KB nasional yang telah dibuat. Kepada Bapak Nandang selaku PLKB. Sebelum lebih jauh kita membahas metode demonstrasi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari demonstrasi. Demontasi adalah cara dalam penyuluhan dengan menggunakan penyajian ide/pengertian yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk

memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu adegan atau tindakan melalui prosedur yang benar, dengan menggunakan alat bantu peraga yang tepat. Bapak Nandang menjelaskan bahwa :

“... tidak ubahnya dengan metode-metode yang lain, namun metode demontrasi lebih mengarahkan kepada peserta KB, bagaimana cara melakukan suatu tindakan berdasarkan prosedur yang benar...”.  
(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas, apa yang disampaikan oleh Bapak Nandang terlihat bahwa metode demontrasi yang digunakan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional dengan cara mempraktekkan dengan menggunakan alat peraga langsung kepada peserta KB berdasarkan prosedur yang benar. Tujuan dari metode ini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta KB khususnya dalam menggunakan alat KB dengan melihat prosedur yang telah diterangkan oleh PLKB.

Kemudian penulis mencoba menanyakan metode yang ketiga yang digunakan PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dalam mensosialisasikan program KB nasional. Metode yang sering digunakan penyuluh dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara konseling. Konseling adalah hubungan antar manusia yang dapat dilakukan antara 2 orang atau lebih, dilakukan secara tatap muka, diselenggarakan secara terencana untuk mencapai tujuan. Konseling adalah bentuk wawancara untuk membantu orang lain dalam memperoleh pengertian baik mengenai dirinya dalam usaha untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu penulis mencoba menanyakan hal apa saja yang harus di perhatikan dalam melakukan

konseling atau percakapan psikologis peserta KB, Bapak Heru Susanto selaku PLKB menjelaskan bahwa:

“... penyuluh harus mengetahui bahwa tidak semua peserta KB aktif mau mengutarakan permasalahan dirinya kepada orang lain. Penyuluh harus menguasai teknik konseling, penyuluh harus mempunyai sikap yang positif ...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa metode konseling ini adalah upaya yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat yaitu KB nasional. Konseling adalah salah satu cara yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB kepada peserta KB aktif. Teknik yang biasa digunakan penyuluh dalam mensosialisasikan program KB nasional kepada peserta KB aktif yaitu dengan memberikan dorongan optimis bahwa masalah yang ada pada diri peserta dapat dipecahkan dan ada jalan keluarnya, selalu memberikan kesempatan kepada peserta untuk bercerita, dan mau bercerita apa adanya. Penyuluh harus cermat dalam mengambil kesimpulan, dan mencari alternatif dan jalan keluarnya. Penyuluh harus dapat mengarahkan kepada peserta untuk yakin atas jalan keluar/alternatif dan dapat dilaksanakan.

Dari metode dan teknik yang diterangkan di atas bahwa penyuluhan yang dilakukan tergantung pada tujuan dan upaya yang dilakukan penyuluh dalam mensosialisasikan program KB nasional kepada peserta KB aktif atau pasangan usia subur ( PUS ). Lalu penulis mencoba menggali lebih dalam lagi pelaksanaan dan pengembangan program yang dilakukan PLKB, di tengah-

tengah masyarakat terutama pada pasangan usia subur (PUS). Penulis mencoba menanyakan kepada salah seorang Kader Penyuluh Bapak Andi Apakah dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, beliau menyatakan bahwa :

“ ...setiap pekerjaan pasti akan ada kendala, terutama kami sebagai penyuluh namun untuk di Kota Bengkulu kami selaku PLKB tidak terlalu menemukan kendala yang begitu berarti. Pada dasarnya kendala yang kami hadapi adalah untuk berinteraksi secara langsung dengan peserta KB agak sulit dikarenakan faktor kesibukan atau cuaca, dan untuk di kota sendiri tingkat pengetahuan akan tata cara ber KB sudah gampang untuk diakses, bisa melalui media elektronik, bidan, puskesmas. Jadi dengan kata masyarakat/peserta KB sudah memahami tentang KB nasional. Berbeda dengan di pedesaan yang tentunya akan mempunyai kendala yang lebih besar ketimbang di kota...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya PLKB yang bertugas di kota tidak menemukan hambatan yang begitu berarti, dalam pelaksanaannya hambatan-hambatan yang ada oleh PLKB masih bisa diatasi. Apalagi pada tingkat kota akses kesadaran masyarakat/peserta KB dalam mencari informasi tentang ber KB lebih relatif gampang, baik itu dari media elektronik, rumah sakit, puskesmas, bidan, dan para orang tua sudah saling berbagi informasi tentang pentingnya ber KB. Berbeda halnya dengan di pedesaan tentu akan ada hambatan yang mungkin lebih besar ketimbang di perkotaan.

Kemudian penulis mencoba dan mencari kejelasan berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Kader Penyuluh tadi, apakah benar adanya dalam pelaksanaannya PLKB sudah melaksanakan tugasnya sebagai

penyuluh berdasarkan metode dan teknik yang telah dijelaskan tadi. Bapak Nandang mengatakan :

“... PLKB dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh sudah sesuai standar dengan menggunakan metode dan teknik yang telah dipelajari...”(*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapat keterangan bahwa dalam pelaksanaannya PLKB menjalankan tugasnya telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dipelajari. Kemudian penulis mencoba menanyakan kembali dengan bapak nandang tentang pelayanan kegiatan yang dilakukan PLKB, beliau menyatakan :

“...pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional dilakukan minimal satu bulan sekali, dengan materi tentang tatacara ber KB dan tempat yang telah ditentukan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang mengatakan bahwa :

“... kita biasanya melaksanakan kegiatan penyuluhan dilakukan satu bulan sekali, dengan lokasi yang berbeda, namun bisa saja dilakukan tiga bulan sekali tergantung dari keadaan kalo kita menemukan kendala di lapangan bisa dilakukan sebulan sekali tapi sebaliknya kalo terkendala kita biasanya menunda pelaksanaannya...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Nandang dan Bapak Heru Susanto selaku PLKB di Kecamatan Teluk Segara didapat keterangan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional kepada masyarakat terutama peserta

KB aktif dilakukan maksimal satu bulan sekali, dan dalam pelaksanaannya materi yang dilakukan adalah penyuluhan yang berkaitan dengan tata cara penggunaan KB dengan dengan lokasi yang telah disepakati dan bisa berpindah-pindah.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tata cara penyuluhan yang diberikan PLKB kepada masyarakat/peserta KB aktif. Penulis menanyakan hal ini kepada salah seorang Kader Penyuluh Ibu Eva Neliani, berikut penuturan beliau :

“...penyuluhan diberikan dengan pemberian materi tentang tata cara ber KB yang benar. Dengan dasar metode dan teknik yang telah di pelajari oleh PLKB, kami juga memberikan pelayanan dan pembinaan kepada peserta KB dengan bekerja sama dengan mitra...”  
(*Wawancara Penulis, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaannya penyuluh melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dan dengan metode serta teknik yang dijelaskan pada awal memasuki aspek perencanaan dan pengelolaan program di atas. Dan diketahui juga bahwa PLKB tidak hanya sekedar menyampaikan informasi semata akan tetapi turut serta dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap pasangan usia subur/peserta KB aktif, hal ini salah satu bentuk keseriusan BPMPKB, PLKB, dan MITRA untuk mensukseskan program KB nasional.

Kemudian penulis mencoba menanyakan tentang kerja sama yang dilakukan pihak mitra dalam hal ini adalah Bidan dengan PLKB dalam

mensosialisasikan program KB kepada masyarakat/peserta KB aktif. Berikut pernyataan yang diberikan oleh salah satu bidan Kelurahan Kandang Limun Ibu Heni, beliau mengatakan :

“...memang benar kami bidan ini melakukan kerja sama dengan PLKB dalam mensosialisasikan program KB kepada masyarakat. Bentuk kerja sama yang kami lakukan itu seperti pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu. Selain melakukan kegiatan posyandu kami juga memberikan brosur kepada peserta KB tentang tata cara pemakaian alat-alat KB yang benar....” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Lalu penulis mencoba mencari kebenaran apakah dalam pelaksanaan tugas sebagai PLKB, sudah menerapkan tata cara pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh kepada masyarakat/peserta KB aktif sesuai dengan tata cara atau metode dan teknik yang telah dipelajari. Kemudian penulis menanyakan hal ini ke beberapa peserta KB aktif, di Kelurahan Kandang Limun tentang bagaimana penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional, yaitu dengan Ibu Ayu Aini, Ibu Rina Safitri, dan Ibu Yanti, mereka mengatakan bahwa :

“... setau ayuk dek, la beberapa tahun iko idak ado penyuluhan tentang KB. Tapi kalo pas ayuk ngikuti kegiatan posyandu untuk anak ayuk kemaren ado dapat iko, caro pakai KB tapi idak dengan penyuluhan dek dengan brosur ajo...”.

(“...setau saya sudah beberapa tahun ini tidak ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB, yang adanya pembagian brosur yang dilakukan pihak mitra pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

“...setau ayuk dek yang sering nyampaikan informasi dan yang ngajari tata cara pemasangan KB tu bidan,apo lagi kini sering nian ayuk nemui tulisan ayo ber KB di depan rumah bidan. masalahnyo

ayuk kemaren baru berobat dari rumah bidan di depan rumah nyo tetempel tulisan ayo ber KB. Kalo penyuluh KB ayuk kurang tau jugo dek, baru kali ini la ayuk dengar kalo ado yang betugas selain bidan,selamo ini ayuk taunyo dari orang tua ayuk caro pakai KB tu dek...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

“...kalau ditanya apakah ada kegiatan yang dilakukan penyuluh dalam menyampaikan informasi tata cara ber KB yang benar itu ada, tapi sudah lama hal itu tidak dilakukan. Tidak tau kenapa ya, paling kalau sekarang adanya itu hanya ajakan atau himbuan pentingnya ber KB. Itupun tidak dengan cara penyuluhan tapi hanya melalui media...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari hasil wawancara dengan ibu –ibu peserta KB aktif di atas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas penyuluh, PLKB belum menjalankan fungsinya atau perannya dengan baik. Hal ini terlihat bahwa masih ada sebagian peserta yang tidak tau akan adanya program penyuluhan yang dilakukan PLKB. Mereka hanya tau peran mitra yang bertugas mensosialisasikan program KB. Dan dapat dikatakan juga bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan yang diberikan PLKB kepada peserta KB aktif belum optimal dan efektif. Karena dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan berbarengan dengan kegiatan lain yang dilakukan mitra, seharusnya PLKB dan mitra bekerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan yang akan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang telah diprogramkan, tidak dicampur adukkan dengan program yang lain. Dan terlihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan PLKB dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh, sedangkan diketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyuluh sudah disediakan anggaran dana dari pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan demi tercapainya kesuksesan program yang telah direncanakan. Lalu penulis mencoba menanyakan apakah ada pembinaan dan pelayanan yang diberikan PLKB kepada salah seorang peserta KB aktif di Kelurahan Kandang Limun Ibu Ayu, beliau mengatakan bahwa :

“...kurang tau jugo dek, tapi setau ayuk di Kandang Limun itu belum tedengar, entah kalau di kelurahan lain kalau ada pelayanan atau pembinaan yang cak itu. tapi kalo ditempat praktek bidan ado, kito yang nanyo kelak baru bidan itu yang njelasin..” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan tugas penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh lapangan masih belum optimal hal ini ditinjau dari masih adanya peserta yang tidak mengetahui peran PLKB dan mitra dalam mensosialisasikan program KB nasional apalagi pembinaan dan pelayanan yang diberikan PLKB.

#### **5.1.2.4 Pengembangan Tugas PLKB**

Secara teknis PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan program KB nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun dalam aspek pengembangan ini penulis mencoba mengetahui tentang teknis pengembangan kemampuan yang dilakukan PLKB Kader Penyuluh dan kemitraan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nandang selaku PLKB, beliau mengatakan bahwa :

“...PLKB harus dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai penyuluh, hal ini dimaksudkan agar penyuluh dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan penyuluhan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa penyuluh harus dapat mengembangkan kapasitasnya sebagai PLKB, dengan kata lain penyuluh harus dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dalam penyampaian informasi. Tidak monoton dengan cara-cara yang lama melainkan dengan ide-ide dan gagasan yang baru. Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang menuturkan bahwa :

“... setiap PLKB, Kader Penyuluh, dan kemitraan harus saling bekerja sama dalam menyampaikan informasi tata cara ber KB kepada peserta KB aktif dengan strategi dan ide-ide yang baru sesuai dengan kemajuan zaman...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dan dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang mana inti dari apa yang disampaikan senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nandang yang mana PLKB, Kader Penyuluh, dan mitra harus dapat bekerjasama dalam mensosialisasikan program KB nasional dan mengembangkan kapasitasnya sebagai penyuluh dengan menggunakan strategi yang baru, dikarenakan tingkat kemajuan teknologi yang semakin mudah untuk diakses dan tingkat kesadaran penduduk perkotaan tentang pentingnya ber KB.

Dalam pengembangan ini PLKB dan mitra juga dituntut agar dapat mengembangkan kemampuannya sebagai PLKB dalam membina memberikan

pelayanan kepada peserta KB aktif. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh salah satu Kader Penyuluh Ibu Eva Neliani, beliau mengatakan :

“...kami selaku Kader Penyuluh dek waktu perekrutan dulu memang sebelumnya dikasih semacam materi tentang KB yang nantinya bakal kami sampaikan ke masyarakat atau ke peserta KB. Jadi, pengembangan disinikan diharapkan kami tu bisa mengembangkan kembali apo yang kami terima dan menyampaikannya ke masyarakat. Tentunya juga kami masih didampingi dan dipantau terus oleh pengawas kecamatan...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Pernyataan Ibu Eva tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas PLKB dalam proses pengembangan ini diartikan sebagai penilaian kemampuan Kader dan mitra secara teknis pada saat di lapangan atau saat berhadapan dengan masyarakat. Hal senada pun diungkapkan oleh bidan sebagai mitra dalam pelaksanaan Tugas PLKB. Bidan Heni pun menyampaikan bahwasanya:

“...memang kami sebagai mitra ini dari awal pelaksanaan adalah bekerjasama dalam mensosialisasikan program KB dengan Kader Penyuluh serta PLKB dan harus menciptakan alternatif-alternatif yang baik dan baru serta strategi yang bagus...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Dari pernyataan Bidan Heni tersebut di atas dapat diketahui bahwasanya antara PLKB, Kader Penyuluh serta Mitra bekerja secara bersama-sama dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program KB ke masyarakat, sehingga pengembangan program yang berdampak pada masyarakat dapat dirasakan dengan hadirnya alternatif yang baik dan bagus.

#### 5.1.2.5 Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB

Pada aspek penulisan yang terakhir ini penulis akan mencoba mengupas dan menanyakan beberapa narasumber tentang adanya evaluasi dan pelaporan yang dilakukan PLKB, penulis mencoba menanyakan kepada Bapak Nandang selaku PLKB terkait dengan adanya evaluasi dan pelaporan yang dilakukan PLKB. Berikut penjelasan beliau :

“... setiap bulannya kami harus melakukan evaluasi dan pelaporan, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami selaku PLKB setiap bulannya, karena semua itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan kami butuhkan, entah itu dari kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau kendala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PLKB setiap bulannya wajib melakukan evaluasi dan pelaporan secara global ke kantor badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana (BPMPKB). Hal ini dimaksudkan agar Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dapat mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan penyuluh dan kendala yang dihadapi penyuluh dalam melaksanakan perannya dalam mensosialisasikan program KB nasional yang menjadi salah satu program yang dibuat dan harus dijalankan oleh kantor BPMPKB melalui PLKB.

Kemudian penulis mencoba menanyakan bentuk laporan yang di berikan PLKB, serta kemitraan setiap bulannya ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Bapak Heru Susanto menerangkan bahwa :

“... kami melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang penyuluh laksanakan, tentu dengan penyuluhan yang kami lakukan kami akan tahu mana peserta KB aktif yang ikut serta dalam mensukseskan program KB, hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan, bentuk laporan yang kami laporkan biasanya data jumlah peserta KB yang menggunakan kondom, pil, atau suntik...” (*Wawancara Penulisan, Desember 2013*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa bentuk laporan yang disampaikan PLKB kepada BPMPKB adalah laporan yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan PLKB serta mitra yaitu jumlah peserta KB aktif yang ikut serta/berpartisipasi setelah diberikan pemahaman dan pelayanan KB, dan laporan persediaan alat kontrasepsi juga vasilitas yang ada harus dilaporkan setiap bulannya hal ini dimaksudkan demi kelancaran PLKB serta mitra dalam mensosialisasikan program KB nasional.

## **5.2 Pembahasan Hasil Penulisan**

Sesuai dengan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan atau memaparkan hasil penulisan yang penulis dapatkan selama di lapangan. Maka dari itu, pada bab ini selain memaparkan hasil wawancara, penulis juga menjelaskan tentang informasi yang didapat selama penulisan, yang berkaitan dengan aspek penelitian :

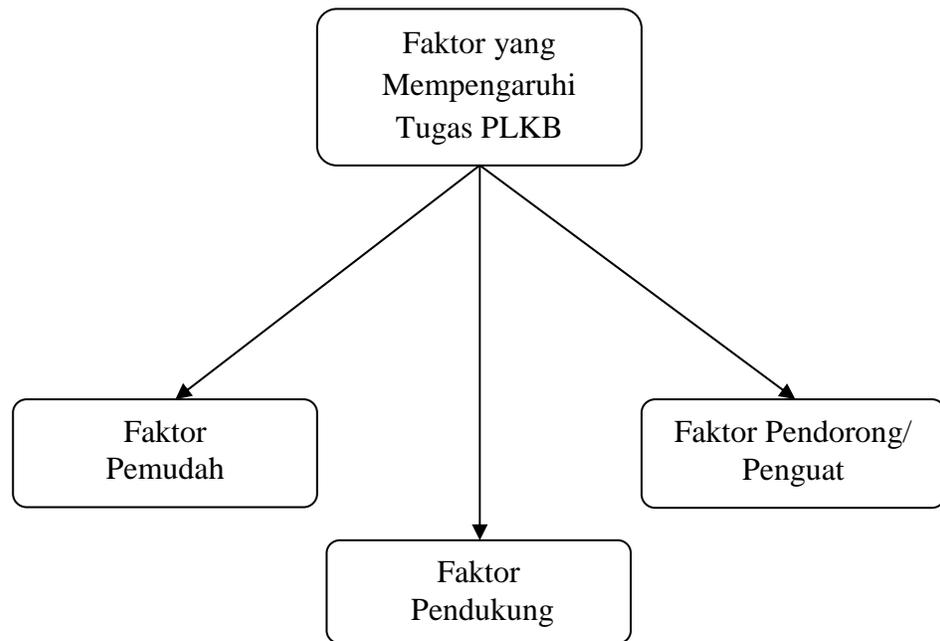
Aspek penelitian yang pertama yaitu rencana pelaksanaan yang dilakukan penyuluh sebelum melaksanakan perannya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan program KB kepada peserta KB aktif. Diketahui bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan pastilah ada suatu rencana yang harus direncanakan, dalam merencanakan kegiatan apa yang akan dilaksanakan nanti maka BPMPKB terutama bidang KB

melakukan rapat koordinasi dengan PLKB untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan PLKB. Pada aspek ini menjelaskan tentang pembahasan yang dilakukan dalam perencanaan yang dilakukan BPMPKB yaitu, membahas tentang penguasaan/identifikasi potensi wilayah sejak pengumpulan data, penentuan masalah, penyusunan jadwal. Penyusunan rencana yang matang memang sangat dibutuhkan sebelum melaksanakan kegiatan hal ini demi tercapainya kesuksesan program yang akan dilaksanakan. Secara keseluruhan untuk aspek yang pertama ini bahwa rencana kerja pelaksanaan tugas penyuluh telah dirapatkan terlebih dahulu antara BPMPKB dan PLKB.

Aspek penulisan yang kedua ini adalah mengenai pengorganisasian yang dilakukan PLKB dalam melaksanakan perannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penyuluhan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengorganisasian yang dilakukan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader serta mitra. Dalam aspek ini dalam pengorganisasian yang dilakukan PLKB semata-mata untuk mempermudah PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh. Tentu tidak memungkinkan bagi PLKB yang jumlahnya terbatas akan dapat menjalankan perannya secara optimal, itulah didalam pengorganisasian yang dilakukan PLKB meningkatkan pengetahuan, merekrut kader dan bekerja sama dengan kemitraan seperti rumah sakit, puskesmas, bidan dan tokoh-tokoh masyarakat. Secara keseluruhan pada aspek ini PLKB berusaha mempermudah proses pelaksanaannya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan

program KB nasional dengan cara merekrut kader serta menjalin kerja sama dengan kemitraan.

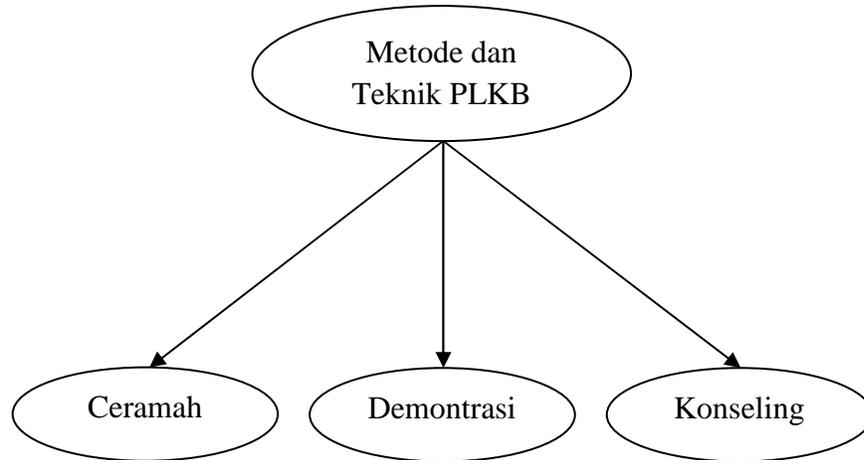
Aspek penulisan yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengelolaan program yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional kepada masyarakat/peserta KB aktif. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan pengembangan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB, maka penulis melakukan wawancara kepada informan dan hasilnya adalah bahwa dalam pelaksanaan yang dilakukan PLKB terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tugas-tugas PLKB. Faktor tersebut adalah seperti yang ada pada grafik gambar berikut ini :



**Gambar 5.1 :**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tugas PLKB**

Faktor Pemudah adalah faktor yang berhubungan dengan yang namanya pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat. Karena seseorang tersebut akan mudah dan cepat berubah karena telah ada dasar pengetahuan dan pengalaman positif dalam dirinya. Faktor yang kedua adalah Faktor pendukung, maksudnya adalah Faktor yang berhubungan dengan dana, sarana, dan tenaga yang tersedia. Faktor ini sangat berdampak positif dalam setiap pelaksanaan tugas PLKB. bayangkan saja jika tidak adanya tenaga kerja yang tersedia dalam penyuluhan maka penyuluhan tersebut tidak akan terlaksana. Sehingga jelas adanya Faktor pendukung ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PLKB. untuk Faktor yang ketiga yaitu faktor pendorong/penguat. Faktor pendorong/penguat yang dimaksud ini adalah pengaruh yang diberikan oleh tokoh agama, Lurah/Kepala Desa, serta Orang tua. Seorang PLKB harus melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat hal ini sesuai dengan langkah-langkah PLKB. Jadi, faktor yang ketiga ini juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang akan dicapai penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh serta menjadi strategi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai PLKB.

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tugas PLKB, ada juga metode-metode dan teknik yang digunakan seorang PLKB. Adapun metode yang dimaksud adalah metode ceramah, demonstrasi, dan konseling. Untuk mudah memahaminya akan penulis sampaikan grafik gambar metode dan teknik yang digunakan PLKB dalam melaksanakan tugasnya. Berikut gambar yang dimaksud.



**Gambar 5.2 :**  
***Motode dan Teknik yang digunakan PLKB***

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan program yang dilakukan penyuluh telah sesuai dengan standar dasar-dasar metode dan teknik yang telah dipelajari dan berdasarkan rencana yang telah dirapatkan bersama sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan metode ceramah, demonstrasi, serta konseling. Hal ini dilakukan karena dirasa lebih efektif dalam penyampaian informasi yang diberikan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional.

Dari hasil lapangan ditemukan fakta yang berbeda, penyuluh tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan pelatihan yang didapat, dengan kata lain penyuluh tidak menjalankan fungsinya sebagai penyuluh hal ini terlihat bahwa penyuluh tidak menjalankan perannya (tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan) seharusnya penyuluh harus melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berorientasi pada pemberian informasi tatacara ber KB dan informasi yang terbaru kepada masyarakat/peserta KB

aktif. Diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan PLKB tidak hanya menyampaikan informasi KB nasional akan tetapi memberikan pelayanan kepada peserta KB aktif. Pada aspek ini juga menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya sebagai penyuluh, penyuluh melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan kemitraan dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. Hal ini terlihat dari keikutsertaan tokoh agama, Lurah, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan, dan Orang Tua yang berbagi informasi kepada peserta KB aktif atau ikut serta dalam mensukseskan program KB nasional.

Aspek yang ke empat adalah pengembangan, untuk mengetahui pengembangan teknis yang dilakukan PLKB dalam penyelenggaraan KB nasional, penulis melihat dari pemecahan masalah yang dilakukan PLKB terkait dengan pelaksanaan dan kendala yang terjadi dilapangan. Dengan kata lain PLKB dituntut agar dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai penyuluh, hal ini di tinjau dari perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan bisa digunakan dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat bersama tersebut.

Aspek penulisan yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan yang dilakukan PLKB serta mitra, yang dilakukan secara global ke kantor BPMPKB. Dari hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa evaluasi dan pelaporan perlu dilakukan oleh PLKB untuk itu penulis menerangkan hasil penjelasan. Dalam pelaksanaan kegiatan pasti akan ada evaluasi dan pelaporan hal ini dimaksudkan agar nantinya dengan adanya evaluasi dan pelaporan PLKB dapat mencari solusi permasalahan yang ada dilapangan secara bersama-sama. Dengan kata lain, dengan adanya evaluasi dan pelaporan BPMPKB, PLKB, serta MITRA dapat mengetahui permasalahan dan kinerja

di lapangan. Evaluasi ini diwajibkan bagi setiap PLKB yang bertugas di lapangan setiap bulannya dalam rangka mensosialisasikan program KB nasional sehingga tercapai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Bentuk pelaporan yang diberikan PLKB serta MITRA secara global ke BPMPKB adalah pelaporan pembinaan yang dilakukan PLKB terhadap pasangan usia subur/peserta KB aktif, persediaan alat kontrasepsi seperti kondom, pil, dan suntik. Jumlah pelayanan ganti cara, jumlah peserta yang melakukan pemasangan ulang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan penulis di lapangan dengan judul penulisan “Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu”. Secara umum kesimpulan dari pelaksanaan tugas PLKB, yaitu:

1. Rencana kerja yang dalam pelaksanaannya telah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan BPMPKB dan dirapatkan secara bersama oleh bidang KB dan PLKB. Perencanaan tugas PLKB dibuat berdasarkan penguasaan identifikasi potensi wilayah sejauh pengumpulan data yang dilakukan, penentuan masalah, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan jadwal. Setelah semua itu selesai dirembugkan secara bersama, maka PLKB tinggal menjalankan fungsinya dalam mensosialisasikan program yang ada kepada peserta KB aktif.
2. Pengorganisasian, berdasarkan hasil penulisan diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan, PLKB membentuk dan merekrut Kader Penyuluh untuk membantu PLKB dalam mensosialisasikan program KB ke masyarakat. Selain merekrut kader diketahui bahwa dalam pengorganisasian ini PLKB juga memperluas pengetahuan dan wawasan yang ada di lapangan. Sebab sebelum dijadikan sebagai PLKB, Kader Penyuluh serta Mitra, diberikan semacam materi khusus tentang KB sehingga saat berada di lapangan mereka mampu menyampaikan program KB tersebut dengan benar dan mudah sehingga dimengerti masyarakat.

3. Pelaksanaan dan pengolahan program. Secara umum tujuan dengan diadakan pelaksanaan dan pengolahan program ialah disamping untuk mensosialisasikan KB nasional ke peserta KB aktif agar tercapainya kesuksesan program, juga untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional, dan mampu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan nantinya. Serta mengetahui perannya dalam melaksanakan tugas sebagai PLKB. Dalam pelaksanaannya PLKB menjalankan fungsinya sebagai penyuluh dengan menggunakan dasar-dasar dan metode serta teknik yang biasa digunakan penyuluh, seperti ceramah, demonstrasi, dan konseling. Hal ini dikarenakan dirasa lebih efektif bagi penyuluh dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan tugas PLKB tidak hanya menjalankan perannya sebagai penyuluh akan tetapi PLKB melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada peserta KB aktif agar tercapainya kesuksesan program KB nasional. Namun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh seringkali kita melihat bahwa penyuluh tidak menjalankan tugasnya dilapangan. Hal ini terlihat masih banyaknya peserta yang tidak mengetahui tugas fungsi PLKB dilapangan
4. Pengembangan. Secara teknis PLKB dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam mensosialisasikan tugasnya di lapangan. Berdasarkan hasil penulisan diketahui bahwa melihat dari hasil pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi di lapangan, seorang PLKB dalam melaksanakan tugas tidak hanya menggunakan cara atau metode itu-itu saja atau dengan kata lain tidak menggunakan cara yang monoton. PLKB selalu melakukan cara yang inovatif dan mengembangkan cara sehingga dapat meningkatkan

kapasitasnya sebagai penyuluh dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Serta tercapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

5. Evaluasi dan pelaporan. Secara keseluruhan setiap pelaksanaan tugas pasti akan ada laporan dan evaluasi. Berdasarkan hasil penulisan diketahui bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui berbagai macam kekurangan serta kelebihan yang terjadi di lapangan. Melalui hasil laporan-laporan yang telah disiapkan oleh PLKB, mereka segera mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Laporan tersebut diterima oleh BPMPKB Kota Bengkulu setiap bulan. Jadi, dengan adanya laporan dan evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk mencari solusi yang lebih baik lagi dalam mensukseskan program yang telah dibuat.

Jadi, dalam pelaksanaan tugas penyuluhan program KB nasional yang dilakukan PLKB di Kota Bengkulu sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan standar pelatihan yang didapat oleh PLKB namun belum maksimal sebab masih adanya peserta KB yang belum mengetahui peran dan fungsi PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penulisan di atas maka pada kesempatan ini ada saran yang ingin penulis sampaikan agar dalam pelaksanaan tugas PLKB akan lebih baik lagi. Diketahui bahwa Fungsi dan peran dari PLKB adalah memberikan informasi tentang tata cara ber KB yang benar kepada peserta KB aktif. Karena itu maka dalam menjalankan tugas sebagai PLKB dan kemitraannya, hendaknya senantiasa bersikap dan bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai PLKB,

dan menjalankan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan, Dalam mensosialisasikan masalah KB nasional PLKB harus lebih aktif lagi dan dengan cara yang lebih inovatif lagi agar nantinya masyarakat, terutama peserta KB aktif akan lebih antusias lagi dalam mengikuti pelaksanaan penyuluhan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Surabaya.

Faisal, Sanafiah. 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.

Hubeis, AVS. 2007. *Motivasi, Kepuasan Kerja dan Produktifitas Penyuluh Pertanian Lapangan (Kasus Kabupaten Sukabumi)*. Jurnal Penyuluhan Vol 3, No 2.. Program Study Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Bogor

Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo : PUSPA.

----- . 2009. *Membangun Pertanian Modern*. UNS-Press. Surakarta

----- . 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. UNS-Press. Surakarta

Moleong, Lexy, J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. Putra Utama. Jakarta.

Umar, Husein. 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.

Van Den Ban dan Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Agnes Dwina Herdiastuti (Pent). Judul Asli : *Agricultural Extention (Second Edition)*. Kanisius. Jogjakarta.

Wahab Abdul, Solihin, 1991, pengantar analisis kebijakan Negara, rineka cipta, Jakarta.

### B. Dokumen-Dokumen

Arisandi, Dedi. 2012. *Pelaksanaan Program Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) DI PT. Bintang Azzahra Kota Bengkulu*. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penempatan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.

Lubis, Ella. 2013. Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Studi Pada BKR Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Suryani, Shinta Dewi, 2011. *Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Para Pekerja Migran Bermasalah Sosial di Kota Bengkulu*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Wiratomo, Satrio Dwi. 2010. Implementasi Program Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera Diera Otonomi Daerah Pada Kantor BPMPKB Kota Bengkulu. Skripsi Jurusan Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Yunita, Reni. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Model Desa Prima di Kota Bengkulu (Studi Kasus pada Pilot Project Kelurahan Pelaksanaan Program Model Desa PRIMA di Kota Bengkulu)*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Zaeni, Akhmad. 2006. Implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

### **C. Internet**

<http://www.bkkbn.co.id/> diakses pada tanggal 15 Juni 2013 Pukul 12:44 WIB.

<http://databasis.bkkbn.go.id/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2013 Pukul 21:11 WIB.

<http://bengkulu.bkkbn.go.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2013 Pukul 20:00 WIB.

<http://bengkulu.bps.go.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2013 Pukul 22:06 WIB.

<http://bps.go.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2013 Pukul 20:00 WIB.

[www.http://datastatistik-indonesia.com](http://datastatistik-indonesia.com) diakses pada tanggal 10 Agustus 2013 Pukul 20:00 WIB.

Turindra, Azis. 2009. *turindraatp.blogspot.com/2009/11/lingkup-kegiatan-penyuluhan-pertanian.html*. diakses pada tanggal 5 Oktober 2013 Pukul 09:44 WIB.

Ramdani, M. Yuda. 2012. *myreducation.blogspot.com/2012/06/makna-konsep-falsafah-dan-prinsip.html*. diakses pada tanggal 6 Oktober 2013 Pukul 21:37 WIB.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

**PEDOMAN WAWANCARA  
(INTERVIEW GUIDE)**

• **Identitas Informan**

Nama :  
Pekerjaan :  
Usia :  
Pendidikan :

• **Pertanyaan Berdasarkan Aspek Penelitian :**

**1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh**

- a. Bagaimana Perencanaan yang dilakukan oleh BPMPKB kepada PLKB ?
- b. Seperti apa dan dalam bentuk apa perencanaan yang dibuat tersebut ?
- c. Bagaimana langkah-langkah perencanaan yang dibuat tersebut ?
- d. Bagaimana cara penguasaan/identifikasi wilayah kerja pada pengumpulan data yang dilakukan PLKB ?
- e. Bagaimana cara penentuan masalah prioritas dalam perencanaan kegiatan PLKB?
- f. Bagaimana penyusunan rencana kerja yang akan dibuat ?
- g. Bagaimana penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilakukan nanti ?

**2. Pengorganisasian**

- a. Apa saja yang dilakukan dalam proses sebagai pengorganisasian ini ?
- b. Bagaimana langkah-langkah dalam penentuan kader ?
- c. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pengorganisasian ini ?
- d. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan kader dalam mensosialisasikan tentang KB ?

**3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program**

- a. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program KB ini ?
- b. Bagaimana proses penyiapan kader dan mitra yang dilakukan PLKB ?
- c. Apa tujuan dalam penyiapan kader dan mitra ?

- d. Apa saja factor-faktor yang mendasari pelaksanaan Tugas PLKB ?
- e. Metode dan teknik apa yang digunakan seorang PLKB dalam menjalankan tugasnya ?
- f. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas PLKB ?

**4. Pengembangan**

- a. Teknik apa yang digunakan dalam pengembangan tugas PLKB ?
- b. Apakah antara mitra dengan kader harus bersama-sama dalam mengembangkan program tersebut ?

**5. Evaluasi dan pelaporan**

- a. Bagaimana proses evaluasi dan pelaporan yang dilakukan seorang PLKB ?
- b. Biasanya kapan waktu pelaksanaan pembuatan pelaporan tersebut ?
- c. Apa tujuan dari diadakannya evaluasi dan pelaporan dalam tugas penyuluh KB ?
- d. Dalam bentuk apa biasanya laporan tersebut dibuat oleh penyuluh KB ?
- e. Adakah kendala yang dihadapi setelah adanya evaluasi ?
- f. Apa harapan yang di inginkan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut ?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Jln. Raya Kandang Limun Bengkulu Telp.21170 Pswt. 212

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Drs. Kahar Hakim, M.Si    | (Pembimbing / Moderator) |
| 2. Suratman, S.IP., M.Si     | Pembahas                 |
| 3. Drs. Sugeng Suharto, M.Si | Pembahas                 |
| 4. Alimansyah, S.IP.,M.PA    | Pembahas                 |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari Jum'at Tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2013 telah diadakan pembahasan seminar proposal skripsi mahasiswa :

Nama : Redo Protomo  
NPM : D1D109029  
Tempat : Ruang Sidang FISIP UNIB  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu

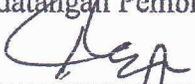
Selama seminar di bawah pengawasan kami, terjadi / tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rekomendasi perbaikan proposal adalah :

1. Latar belakang : permasalahan tugas PLKB harus ada
2. Teori yang digunakan harus berhubungan dengan implementasi/pelaksanaan
3. Menutip dan juga nama penulis di dalam Daft. Pustaka
4. Judul diganti dengan Analisis pelaksanaan tugas PLKB dan ketemuannya
5. Metode : Sample dengan informan di situ

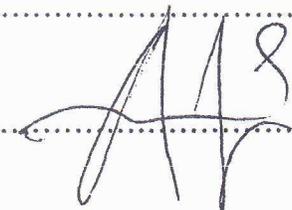
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 04 OKT 2013  
Tandatangan Pembimbing dan Pembahas

1. 

2. 

3. 

4. 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Jln. Raya Kandang Limun Bengkulu Telp.21170 Pswt. 212

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 475 /UN30.5.IANE/PP/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Ekstensi Ilmu Administrasi Negara menerangkan bahwa Saudara :

1. Nama : Redo Protomo
2. NPM : D1D109029

Telah selesai melaksanakan seminar proposal skripsi dengan Judul :

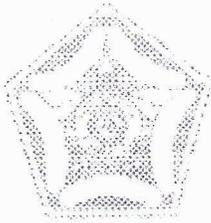
*Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.*

Pada tanggal 4 Oktober 2013, dan telah diperbaiki untuk diberikan rekomendasi melaksanakan penelitian lapangan.

Demikian agar menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 24 Oktober 2013  
Ketua Program,

Drs. Jarto Tarigan, MS  
NIP 195711081984031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A  
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 21038  
Laman : <http://fisip.unib.ac.id> e-mail : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

Nomor : 4419/UN30.5/EP/2013  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

24 Oktober 2013

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)  
Propinsi Bengkulu

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang berikut :

Nama : Redo Protomo  
N.P.M : D1D109029  
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara Ekstensi

berencana melakukan penelitian untuk Skripsi dengan judul : Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.

Lokasi Penelitian : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.

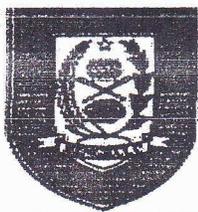
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memberikan Izin Penelitian bagi mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan Bid. Akademik



Drs. Purwadi Eka Tjahjono, MA.  
NIP. 195811161987021002



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225  
Website: [www.kp2tprovengkulu.go.id](http://www.kp2tprovengkulu.go.id) Blog: [www.kp2tbenkulu.blogspot.com](http://www.kp2tbenkulu.blogspot.com)  
BENGKULU

## REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 2609 /KP2T/2013

## TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB). Nomor : 4419/UN30.5/EP/2013, Tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 25 Oktober 2013

Nama / NPM : Redo Frotomo / D1D109029  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 25 Oktober 2013 s/d 25 November 2013  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 25 Oktober 2013

A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan / Non  
Perizinan Bidang Pemerintahan Dan  
Kesejahteraan Rakyat,





PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227  
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992  
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/1274/11/BPPT/2013

**Dasar** : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

**Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/2609/KP2T/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

**Nama/NPM** : Redo Frotomo / D1D109029  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)  
**Judul Penelitian** : Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu

**Daerah Penelitian** : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu

**Waktu Penelitian** : 11 Oktober 2013 s.d 11 Desember 2013

**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB)

**Dengan Ketentuan** :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 28 Oktober 2013

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA BENGKULU



**Dr. H. SYAIFUDDIN, MM**

Pembina Tk.I / NIP. 19620408 198903 1 008



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**  
**(BPMPKB)**

**Jl. Musium No. 06 Telepon (0736) 346373 Bengkulu - 38226**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 800 / 125 /BPMPKB/2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
NIP : **19640601 199103 2 002**  
Pangkat : **Pembina Utama Muda**  
Jabatan : **Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,  
dan Keluarga berencana Kota Bengkulu**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REDO FROTOMO**  
NPM : **D1D109029**  
Jurusan : **Program Ekstensi Studi Ilmu Administrasi Negara**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian pada Badan pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor : 070/1274/1/BPPT/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, dengan judul penelitian, "*Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.*"

Demikian surat ketengan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bengkulu**  
Pada tanggal : **Februari 2014**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Jln. Raya Kandang Limun Bengkulu Telp.21170 Pswt. 212**

**BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Drs.Kahar Hakim,M.Si    | Ketua   |
| 2. Suratman,S.IP.,M.Si     | Anggota |
| 3. Drs.Sugeng Suharto,M.Si | Anggota |
| 4. Alimansyah,S.IP.,M.PA   | Anggota |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Februari Tahun 2014 diadakan ujian skripsi mahasiswa :

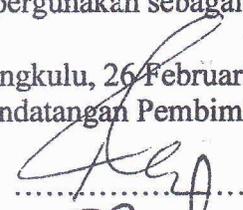
Nama : Redo Protomo  
 NPM : D1D109029  
 Tempat : Ruang Sidang Fisip  
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan,dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu.

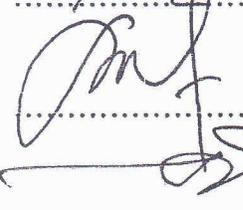
Selama ujian di bawah pengawasan kami, terjadi / tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rekomendasi perbaikan skripsi adalah :

1. *Judul pada tempat/lokus penelitian ?.*
2. *Dati yang berkaitan dengan fenomena masalah PLKB misal: jumlah lokal PLKB*
3. *Rumusan masalah ke-2. tdk perlu*
4. *Teknik penulisan dan gaya*
5. *Pembah masalah dan waktu/proses menjadi skripsi*

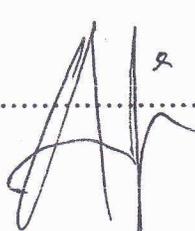
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 Februari 2014  
 Tandatangani Pembimbing dan Penguji

1.  .....

2.  .....

3. ....

4.  .....

**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KOTA BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
6. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional badan di lapangan;
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

- a. LTD berbentuk Badan
- b. LTD berbentuk Kantor

### **Pasal 3**

LTD berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 2 terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

### **Pasal 4**

LTD berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 2 terdiri dari :

- a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Kantor Penghubung;
- c. Kantor Satpol PP;
- d. Kantor Pemadam Kebakaran.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 5**

- (1) LTD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 peraturan daerah ini adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) LTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah sesuai dengan bidang kewenangannya

Paragraf 4  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  - c. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
  - d. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
  - e. Melakukan kegiatan kesekretariatan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Kelurahan;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan Teknologi tepat guna dan Sumber daya alam.
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pagarutamaan gender dan Perlindungan Perempuan;
    2. Sub Bidang Organisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesejahteraan Perempuan.
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
    2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - f. Bidang Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.



# BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

(BPMPKB)

Jalan Musiun No. 06 Telepon (0736) 346373 Bengkulu - 38226

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA PENYULUH KB

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

*Sihaw man*

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di tingkat kelurahan, maka dipandang perlu untuk menata wilayah binaan tenaga penyuluh KB pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;
- c. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk mengemban tugas tersebut sesuai dengan fungsinya.

**Mengingat :**

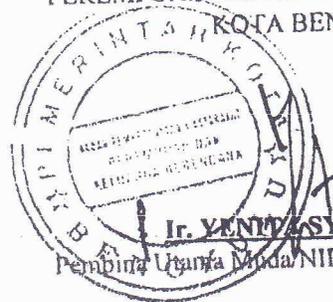
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU TENTANG PENEMPATAN TENAGA PENYULUH KB PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU.
- PERTAMA :** Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat pada kolom 2 dalam lampiran keputusan ini di pindah tugaskan pada wilayah kerja sebagaimana tersebut pada kolom 6 lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pegawai Negeri Sipil yang dipindah tugaskan sebagaimana dimaksud pada butir pertama di atas, harus melaksanakan 10 langkah PLKB yakni :
1. Pendekatan Tokoh Formal
  2. Pendataan dan Pemetaan
  3. Pendekatan Tokoh Informal
  4. Peribentukan Kesepakatan (MMD)
  5. Pemantapan Kesepakatan
  6. KIE Oleh Tokoh Masyarakat
  7. Pembentukan Grup Pelopor
  8. Pelayanan KB
  9. Pembinaan Keluarga
  10. Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan.
- Apel pagi dan siang serta berkedudukan/berkantor di Kantor Lurah Wilayah binaan.
- KETIGA :** Tempat kedudukan penyuluh KB sebagaimana tersebut pada butir kedua diatas, diatur oleh Kepala UPTD Kecamatan dan dilaporkan kepada Kepala PMPKB Kota Bengkulu.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas, Penyuluh KB wajib membuat rencana kerja operasional kegiatan mingguan dan bulanan yang harus diketahui oleh Lurah serta dilaporkan kepada Kepala UPTD Kecamatan, 1 hari di Klinik KB dan 4 hari di Kelurahan binaan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
pada tanggal : 2 Februari 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

### Tembusan :

1. Yth. Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Bengkulu
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
4. Yth. Kepala BKD Kota Bengkulu

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA B.MPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN GADING CEMPAKA

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Dra. Herlianti	19690912 199402 2 001	Kel. Cempaka Permai Kel. Lingkak Barat	
✓ 2.	Periani	19710205 199303 2 006	Kel. Sidomulyo	
✓ 3.	Siti Linawati. BPA	19650530 198903 2 001	Kel. Padang Harapan	
✓ 4.	Eko Akhnad Affandi, ST	19840302 201001 1 015	Kel. Jalan Gedang	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Muda NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN TELUK SEGARA

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
1.	Drs. Heru Susanto ✓	19661124 199402 1 001	Kel. Pasar baru Kel. Berkas Kel. Sumur Meleleh Kel. Jitra	
2.	Nurpajril Akmar, SE ✓	19630819 198403 2 006	Kel. Tengah Padang Kel. Pintu Batu Kel. Pasar Melintang	
3.	Nurlelawati	19640820 198603 2 005	Kel. Bajak Kel. Kampung Bali Kel. Malabero	
4.	Drs. Nandang ✓	19652004 199402 1 00 1	Kel. Kebun Roos Kel. Kebun Keling Kel. Pondok Besi	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



Ir. YENIT SYAIFUL, M.Si  
Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
 TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN SELEBAR

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Kosasi	19650417 199603 2 003	Kel. Pagar Dewa	
✓ 2.	Babul Almi, SH	19661004 199503 1 001	Kel. Betungan Kel. Sumur Dewa	
✓ 3.	Lisa Menawati	19671217 198903 2 004	Kel. Pekan Sabtu	
✓ 4.	Hermawati, S.Sos	19630129 198603 2 005	Kel. Sukarami	
✓ 5.	Angkus Masnun, SH	19670206 199503 2 002	Kel. Bumi Ayu	
✓ 6.	Nurmawati, SE	19620823 198603 2 005	Staf Bf MPKB	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
 PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA BENGKULU



IR. YENITA SYAIFUL, M.Si  
 Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
1.	Dra. Luthvi Woro H	19680123 199402 2 001	Kel. Bentiring Kel. Bentiring Permai	
2.	Liza Parsita	19640628 198903 2 004	Kel. Rawa Makmur Permai	
3.	Irlan	19701003 199703 1 005	Kel. Rawa Makmur	
4.	Heri Rifai	19580809 198803 1 003	Kel. Kandang Limun Kel. Pematang Gubernur Kel. Beringin Raya	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



H. YENIT SYAIFUL, M.Si  
Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN RATU AGUNG

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Ir. Neli Gustini	19680801 199503 2 002	Kel. Kuala Lempuing Kel. Nusa Indah	
✓ 2.	Murni	19580415 198503 1 005	Kel. Sawah Lebar Baru	
✓ 3.	Erwinsayah siregar	19800826 200901 1 012	Kel. Sawah Lebar	
✓ 4.	Drs. Dedi Januardi	19690104 199312 1 002	Kel. Kebun Tebeng	
✓ 5.	Giswanti	19681005 198803 2 001	Kel. Kebun Beler Kel. Kebun Kenanga	
6.	Zubaidah	19611001 198502 2 004	Kel. Tanah Patah	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si  
Pemula Muda/NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN RATU SAMBAN

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Emmerita, S.Sos	19641030 198903 2 004	Kel. Anggut Atas Kel. Padang Jati	
✓ 2.	Suliah, S.Sos	19620226 198403 2 004	Kel. Anggut Dalam Kel. Penurunan	
✓ 3.	Hemalia Deta, S.Sos	19691212 198903 2 001	Kel. Anggut Bawah Kel. Kebun Geran	
✓ 4.	Jadri, S.Pd	196208047 198703 1 006	Kel. Kebun Dahri Kel. Belakang Pondok	
✓ 5.	Handri	19801020 200604 1 009	Kel. Pengantungan	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU



**Ir. KENITA SYAIFUL, M.Si**

Pembina Muda/NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
 TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN SINGARAN PATI

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Rostiana, BA	19390609 198803 2 001	Kel. Timur Indah	
✓ 2.	Dra. Marhamah	19630409 199203 2 001	Kel. Panorama Kel. Jembatan Kecil	
✓ 3.	Nahnul Iman, SE	19720724 199803 1 006	Kel. Dusun Besar Kel. Lingkar Timur	
✓ 4.	Ir. Retno M	19681226 199301 2 002	Kel. Padang Nangka	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
 PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA BENGKULU



Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
 TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
1.	Dra. Nashayati ✓	19650201 199402 2 001	Kel. Muara Dua Kel. Kandang Mas	
2.	Jariah, SKM ✓	19650601 198903 2 006	Kel. Padang Serai Kel. Kandang	
3.	Indra jaya, SE ✓	19650122 199402 1 001	Kel. Sumber Jaya	
4.	Sudirman ✓	19790101 200701 1 012	Kel. Teluk sepong	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
 PEREMPTIAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA BENGKULU



Ir. YENITA SYAIFUL, M.SI  
 Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

*[Handwritten signature]*

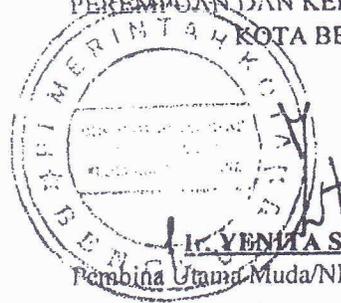
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMPKB KOTA BENGKULU

NOMOR : 55 Tahun 2013  
 TANGGAL : 2 Februari 2013

KECAMATAN SUNGAI SERUT

NO	NAMA	NIP	WILAYAH BINAAN	KET
✓ 1.	Mardiati, S.Pd	19680521 199303 2 002	Kel. Sukamerindu → Kel. Tanjung Jaya → M. Kel. Tanjung Agung lry.	
✓ 2.	Drs. Suryadi	19850925 199203 1 002	Kel. Semarang lvs Kel. Surabaya m	
✓ 3.	Drs. Azhari	19671218 199402 1 002	Kel. Pasar bengkulu Kel. Kampung Kelawi	

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
 PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA BENGKULU



I. YENITA SYAIFUL, M.Si  
 Pembina Utama Muda/NIP 19640601 199103 2 002

*Handwritten initials/signature.*

LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN LAPANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)

BULAN : Novembar  
KABUPATEN/KOTA : Kota Bengkulu  
PROVINSI : BENGKULU

TAHUN : 2013  
NO. KODE KABUPATEN/KOTA : 177  
NO. KODE PROVINSI : 17

I. KEADAAN UMUM

NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH YANG DILAPORKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	9	9
2	PPLKB/Petugas KB Kecamatan	8	8
3	Desa/Kelurahan	71	67
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	42	42
5	PPKBD	67	67
6	Sub PPKBD	1129	1129
7	Kelompok KB	1034	1034
8	Kelompok Kegiatan BKB	78	78
9	Kelompok Kegiatan BKR	78	78
10	Kelompok Kegiatan BKL	64	64
11	Kelompok Kegiatan UPPKS	64	64
12	Jumlah PIK Remaja	75	75
	a. Jumlah PIK Remaja Tumbuh	58	58
	b. Jumlah PIK Remaja Tegak	10	10
	c. Jumlah PIK Remaja Tegar	7	7

II. KEGIATAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Frekwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota	3
2	Frekwensi Rakor Program KB tingkat Kecamatan	9
3	Frekwensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan	67
4	Frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB	67
5	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KR	67
6	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang Aktif melakukan KIE KB	67
7	Frekwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan	18
8	Frekwensi TKBK dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	3

III. PEMBINAAN KETAMAHAN KELUARGA

NO	URAIAN	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	3341	2447	1594
2	Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	1783	1288	883
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/ penyuluhan	1087	1010	587
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	1472	844	541
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	547	315	241
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB	1322	743	467
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	414	270	160
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	47	42	41
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	910		

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	URAIAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :		
a.	Jumlah anggota kelompok UPPKS	1284	
b.	Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I	626	
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :		
2.1	Anggota dari Seluruh Tahapan KS		
a.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	963	
b.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	841	
2.2	Anggota dari Tahapan Pra S dan KS I		
a.	Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS	403	
b.	Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber KB	369	
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	19	
NO	URAIAN	JUMLAH SUMBER MODAL	JUMLAH MODAL (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya pada bulan ini :	4	Rp 50,000,000
a.	APBN	2	Rp 15,000,000
b.	APBD	0	Rp 0
c.	KRISA	0	Rp 0
d.	KUR	0	Rp 0
e.	PNPM	1	Rp 18,000,000
f.	Lainnya	1	Rp 17,000,000

V. PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER KB

NO	URAIAN	PELAYANAN PEMERINTAH	PELAYANAN SWASTA	SELURUH TAHAPAN KS	TAHAPAN PRA S & KS I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)			54991	10239
2	Jumlah Peserta KB Aktif :	32856	16170	49026	8562
a.	IUD (I)	3072	1337	4409	736
b.	MOW (OW)	918	253	1171	253
c.	MOP (OP)	151	8	159	66
d.	KONDOM (K)	1427	908	2335	645
e.	IMPLAN (IP)	4012	977	4989	1315
f.	SUNTIK (S)	14344	7642	21986	2844
g.	PIL (P)	8932	5045	13977	2703
3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB :			5965	1677
a.	Hamil (H)			977	294
b.	Ingin Anak Segera (IAS)			1924	503
c.	Ingin Anak Ditunda (IAT)			1536	508
d.	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)			1528	372

CATATAN : Laporan ini harus sudah diterima di BKKB Provinsi setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

## REKAPITULASI LAPORAN BULANAN KLINIK KB TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NAMA KABUPATEN/KOTA : Kota Bengkulu

NAMA PROVINSI : BENGKULU

STATUS DAERAH : 1. DAERAH KHUSUS

: 1. TERTINGGAL     2. TERPENCIL      
3. PERBATASAN     4. KEPULAUAN   

2. BUKAN DAERAH KHUSUS

NO. KODE KABUPATEN/KOTA : 17 71

NO. KODE PROVINSI : 17

BULAN DAN TAHUN : Januari-Nopember 2013

NO	TEMPAT PELAYANAN KB	YANG ADA	YANG DIPAPORKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Klinik KB Pemerintah	69	
2.	Jumlah Klinik KB Swasta	5	
3.	Jumlah Dokter Praktek Swasta	42	
4.	Jumlah Bidan Praktek Swasta	152	

### I. HASIL PELAYANAN PESERTA KB BARU

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH PEMBERIAN INFORMED CONSENT	JUMLAH PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH				JUMLAH PESERTA KB BARU KPS DAN KS I / JAMKES	JUMLAH PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN / PASCA KEGUGURAN	
			KLINIK KB		DOKTER PRAKTEK SWASTA	BIDAN PRAKTEK SWASTA			TOTAL
			PEMERINTAH	SWASTA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IUD	1365	1261	71	40	415	1787	311	173
2	MOW	264	169	110	12		291	40	6
3	MOP	8	1	3	4		8	1	0
4	KONDOM		858	30	0	332	1220	123	49
5	IMPLANT	698	661	15	12	321	1009	103	52
6	SUNTIKAN		3198	138	40	1824	5200	535	263
7	PIL		2214	130	3	1117	3464	428	110
JUMLAH		2335	8362	497	111	4009	12979	1541	653

### II. PELAYANAN PESERTA KB ULANG

#### A. HASIL PELAYANAN KASUS

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH KOMPLIKASI BERAT	JUMLAH KEGAGALAN	JUMLAH PENCABUTAN IUD DAN IMPLANT OLEH			
				KLINIK KB	DOKTER PRAKTEK SWASTA	BIDAN PRAKTEK SWASTA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IUD	0	0	198	3	158	359
2	MOW	1	0				
3	MOP	0	0				
4	KONDOM						
5	IMPLANT	0	0	370	6	196	572
6	SUNTIKAN						
7	PIL						
JUMLAH		1	0				

#### B. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI ULANG

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH PELAYANAN GANTI CARA		JUMLAH PEMASANGAN ULANG IUD DAN IMPLANT OLEH								JUMLAH PEMBERIAN KONTRASEPSI ULANG			JUMLAH PELAYANAN ULANG KPS DAN KS I / JAMKES
		PEMBERIAN INFORMED CONSENT	GANTI CARA KE	KLINIK KB		DOKTER PRAKTEK SWASTA		BIDAN PRAKTEK SWASTA		TOTAL		KONDOM	SUNTIKAN	PIL	
				IUD	IMPLANT	IUD	IMPLANT	IUD	IMPLANT	IUD	IMPLANT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IUD	16	37	106		3		86		195					22
2	MOW	15	15												0
3	MOP	0	0												0
4	KONDOM		49									751			587
5	IMPLANT	13	18		143		25	86		244					31
6	SUNTIKAN		211										7675		4672
7	PIL		124											6561	3842
JUMLAH		44	454												9154

### III. PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI

NO.	PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI	IUD (unit)	KONDOM (buah)	IMPLANT (unit)	SUNTIKAN (vial)	PIL (strip)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sisa Akhir Bulan Lalu	4232	5889	3131	27194	263819
2	Diterima Bulan Ini	901	1911	840	11972	48690
3	Dikeluarkan Bulan Ini	681	1565	744	12715	40991
4	Sisa Akhir Bulan Ini	4452	6235	3227	26451	271518

Catatan : Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten/Kota ini harus sudah diterima di BKKBN Provinsi dan Tambahan diterima ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik Kesehatan Reproduksi tanggal 10 bulan berikutnya.

Kepala SKPD KB Kabupaten/ Kota .....

(.....)  
NIP. ....



## DOKUMENTASI PENELITIAN



